

**KEBIJAKAN JOKOWI MEMBATASI BANTUAN INTERNASIONAL  
DALAM MENANGANI BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI PALU,  
SIGI, DAN DONGGALA TAHUN 2018**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**RADILYA NURCAHYA MADIL**

**19323072**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**KEBIJAKAN JOKOWI MEMBATASI BANTUAN INTERNASIONAL  
DALAM MENANGANI BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI PALU,  
SIGI, DAN DONGGALA TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**RADILYA NURCAHYA MADIL**

**19323072**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN JOKOWI MEMBATASI BANTUAN INTERNASIONAL DALAM  
MENANGANI BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI PALU, SIGI, DAN  
DONGGALA TAHUN 2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

23 Juni 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia


Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A Ph.D
3. Masitoh Nur Rohma S.Hub.Int, M.A.

Tanda Tangan

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 26 Juni 2023



---

*Radilya Nurcahya Madil*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



### **Alhamdulillahirabbil'amin**

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

#### **Bapak, Mama, Keluarga, dan Sahabat**

Terima kasih atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat dan semangat yang tak terhingga yang telah diberikan selama ini

#### **Diri saya sendiri**

Terima kasih untuk tidak pernah lelah dalam berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini di tengah-tengah ketidakpastian dunia yang penuh dengan huru hara

#### **Orang-orang yang selalu bertanya kapan skripsiku selesai**

Terima kasih karena atas pertanyaan sederhana tersebut menjadikan dorongan bagi saya untuk segera menyelesaikan studi saya

## HALAMAN MOTTO

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, kerjakan dan sidangkan!”

“Inti dari semua perjalanan ini adalah proses memperbaiki hati. Hati yang dulu sangat sempit, dengan kasih sayang Allah kemudian Dia menjadikan hati ini lapang sehingga ingin terus menjadi baik, jaga hatimu terus ya, sebab ia adalah bagian yang paling penting dalam hidup ini”

-Ikakapiso-

“Ya Allah, aku berjalan dengan penuh keraguan dan kekhawatiran. Namun yang menjadikan diri ini tetap bergerak adalah keyakinan bahwa engkau akan mempermudah setiap jalan yang didalamnya ada niat baik”

-Doa Radilya di setiap Sholat-

“Aku sudah melihat segala bentuk rezeki, tapi tidak aku temukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran”

-Umar bin Khattab-

“Kita gak akan belajar kalau gak tau salahnya dimana, kita gak akan tau rasanya sembuh kalau gak dikasih sakit, kita gak akan tau seseorang itu baik atau tidak kalau bukan tuhan sendiri yang patahin hati kita. Jadi rasain marahnya dulu, lalu atur ulang rencana, jangan mau kalah sama yang bikin kita patah”

-ntsana-

“Jika masa lalu tak layak untuk diungkit kembali, mari kita ciptaka masa depan yang layak untuk diceritakan”

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita nabiullah Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa lahirnya karya sederhana ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak, sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi dengan hasil yang baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak rasa syukur dan terima kasih atas berbagai bentuk dukungan dan bantuan baik berupa moril dan materil. Tak terhitung pengalaman serta ilmu yang penulis dapatkan selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik.
2. Kedua Orangtua tercinta, mama bapak terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang selalu menyertai langkah saya dalam menuntut ilmu, terima kasih untuk tidak pernah lelah demi menafkahi kelima anak, semoga bapak dan mama senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur sampai melihat kakak dan adik sukses.
3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
4. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
6. Gustrieni Putri, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, serta bantuan yang ibu berikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ditengah kesibukan dan keseharian Ibu. Terimakasih atas segala bentuk motivasi, ilmu dan saran yang Ibu sampaikan sehingga membuat diri ini merasa semakin percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT.
6. Willi Ashadi, S.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Terimakasih atas bimbingan, dampingan, dan saran yang telah diberikan selama studi saya di HI UII.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Berkat pengorbanan, ketulusan, kebaikan, dan ilmu pengetahuan yang Bapak dan Ibu berikan, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Semoga program studi HI UII akan selalu sukses dan membanggakan dari segi kualitas pendidikan yang diberikan.
8. Kepada saudara dan saudari saya, Habib, Ayyas, Izza, dan Hafidzhan. terima kasih karena selalu mendukung saya dan menjadi boodmoster saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kita cepat bertemu dan bersua kembali di kota Sorong tercinta. Terkhusus Hafizhan adik saya yang paling ganteng dan menggemaskan terima kasih sudah lahir di dunia ini dan membawa perubahan besar bagi keluarga.

9. Kepada rekan dan sahabat saya yang ada di Sorong yaitu Yanti, Group ODGJ, TPO 28, sepupu-sepupu saya Vita, Ria. Terima kasih sudah menjadi *support system* terbaik, yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada saya untuk terus bertahan di tanah rantau. Semoga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali, sukses dan jaya selalu buat kita semua hehe
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan saya di HI UII, Fitri, Farah, Nisa, Enita, Hilmah, Bila. Terima kasih karena sudah mau berteman, membantu dan selalu mensupport saya untuk terus bertahan di Jogja, terima kasih karena hanya kalian teman saya di prodi HI UII yang bertahan dari maba sampai saat ini.
11. Kepada teman-teman KKN saya unit 39 yaitu Tiara, Alya, Suci, Ayi, Han, Ibnu, Alrya, dan Tama. Terima kasih sudah pernah kebersamaan dan mewarnai kehidupan saya selama KKN, walaupun hanya 1 bulan pertemuan kita, tetapi momen yang pernah kita lalui bersama tidak akan pernah terlupakan, kalian adalah salah satu teman-teman terbaik yang pernah saya temui selama berkuliah di UII. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semangat mengerjakan tugas akhir teman-teman, semoga kita semua bisa bertemu dilain kesempatan.
12. Kepada El Rumi, Panorama (Paul, Nabila, Rony, Salma) finalis Indonesian Idol XII. Kalian adalah idola-idola saya, terima kasih karena telah menjadi penyemangat dan hiburan bagi saya selama mengerjakan skripsi, terima kasih untuk energi positif yang terus kalian berikan kepada fans-fans

13. Kepada rekan dan sahabat saya yang ada di Sorong yaitu Yanti, Group ODGJ, TPO 28, sepupu-sepupu saya Vita, Ria. Terima kasih sudah menjadi *support system* terbaik, yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada saya untuk terus bertahan di tanah rantau. Semoga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali, sukses dan jaya selalu buat kita semua hehe
14. Kepada rekan-rekan seperjuangan saya di HI UII, Fitri, Farah, Nisa, Enita, Hilmah, Bila. Terima kasih karena sudah mau berteman, membantu dan selalu mensupport saya untuk terus bertahan di Jogja, terima kasih karena hanya kalian teman saya di prodi HI UII yang bertahan dari maba sampai saat ini.
15. Kepada teman-teman KKN saya unit 39 yaitu Tiara, Alya, Suci, Ayi, Han, Ibnu, Alrya, dan Tama. Terima kasih sudah pernah kebersamaan dan mewarnai kehidupan saya selama KKN, walaupun hanya 1 bulan pertemuan kita, tetapi momen yang pernah kita lalui bersama tidak akan pernah terlupakan, kalian adalah salah satu teman-teman terbaik yang pernah saya temui selama berkuliah di UII. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semangat mengerjakan tugas akhir teman-teman, semoga kita semua bisa bertemu dilain kesempatan.
16. Kepada El Rumi, Panorama (Paul, Nabila, Rony, Salma) finalis Indonesian Idol XII. Kalian adalah idola-idola saya, terima kasih karena telah menjadi penyemangat dan hiburan bagi saya selama mengerjakan skripsi, terima kasih untuk energi positif yang terus kalian berikan.

17. Kepada diri saya sendiri Radilya Nurcahya Madil, dil terima kasih karena sudah mau belajar, berjuang dan bertahan sejauh ini, meskipun banyak suka duka yang dialami selama perkuliahan dan di luar perkuliahan. Terima kasih karena tidak pernah memilih untuk berhenti menjadi lebih baik dari yang lalu. Terima kasih untuk selalu mau berdamai dengan hal-hal yang menyakiti jiwa. Terima kasih karena memilih tetap tumbuh saat badai terus terusan menghantam. Kuat terus ya dil, ditunggu petualangan sang Radil di episode kehidupan berikutnya.

## DAFTAR ISI

### SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Cakupan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>10</b>
<b>1.8 Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<i>1.8.1 Jenis Penelitian.....</i>	<i>17</i>
<i>1.8.2 Subjek dan objek Penelitian.....</i>	<i>17</i>
<i>1.8.3 Alat Pengumpulan Data.....</i>	<i>17</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian.....</i>	<i>17</i>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MERESPONS BANTUAN INTERNASIONAL SEBELUM DAN PADA SAAT BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI PALU, SIGI, DAN DONGGALA TAHUN 2018 .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1 Kebijakan Indonesia terhadap bencana Alam di Indonesia di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Merespons Bantuan Internasional.....</b>	<b>20</b>
<b>2.2 Kebijakan Indonesia Terhadap Bencana Alam di Indonesia Sebelum Terjadi Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala di Era Presiden Joko Widodo Dalam Merespons Bantuan Internasional.....</b>	<b>25</b>

<b>BAB III KEBIJAKAN JOKOWI MEMBATASI BANTUAN INTERNASIONAL DALAM MENANGANI BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI PALU, SIGI, DAN DONGGALA TAHUN 2018 DARI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL.....</b>	<b>37</b>
<b>3.1 Faktor Internal yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.....</b>	<b>38</b>
3.1.1 <i>Non- Human Environment (Pertimbangan Politik Domestik Indonesia) yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.....</i>	<i>38</i>
3.1.2 <i>Faktor Human Environment (Kemampuan Pemerintah dalam Menangani Bencana) yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.....</i>	<i>44</i>
<b>3.2 Faktor Eksternal yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.....</b>	<b>49</b>
3.2.1 <i>Faktor Non- Human Environment ( Kondisi atau Sifat Pemberian Bantuan Internasional) yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.....</i>	<i>49</i>
3.2.2 <i>Faktor Non-Human Environment (Kondisi Aksesibilitas dan Tantangan Koordinasi) yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.....</i>	<i>54</i>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>57</b>
<b>4.2 Rekomendasi.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Internal dan Eksternal setting Snyder.....

## DAFTAR SINGKATAN

AHA Center	: <i>Asean Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management</i>
BMKG	: <i>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</i>
BNPB	: <i>Badan Nasional Penanggulangan Bencana</i>
BU	: <i>Bujur Timur</i>
CWS	: <i>Church World Service</i>
HOPE	: <i>Humanitarian Outreach Project for Education</i>
ICS	: <i>Integrated Community Shelters Post Disaster</i>
IFRC	: <i>International Federation of Red Crescent Societies</i>
IGO	: <i>International Government Organization</i>
INGOS	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
KKN	: <i>Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</i>
LKBN	: <i>Lembaga Kantor Berita Nasional</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
LU	: <i>Lintang Utara</i>
OXFAM	: <i>Oxford Committee for Famine Relief</i>
PASIGALA	: <i>Palu, Sigi, dan Donggala</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
RPJMN	: <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</i>
SBY	: <i>Susilo Bambang Yudhoyono</i>
SR	: <i>Skala Richter</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
USGS	: <i>United States Geological Survey</i>

## ABSTRAK

Indonesia telah menjadi berita utama global dalam beberapa tahun terakhir dengan laporan di seluruh dunia tentang hilangnya ratusan ribu nyawa orang dan dampak buruk yang ditimbulkan akibat bencana alamnya yang dahsyat, salah satu bencana tersebut yaitu gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 di Palu, Sigi, dan Donggala. Setelah terjadi bencana terkadang kehadiran bantuan internasional sebagai salah satu aspek penunjang yang dapat mendukung keberhasilan penanggulangan bencana kerap kali menjadi pertimbangan suatu negara. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah suatu negara untuk menerima atau menolak bantuan internasional dalam penanggulangan bencana alam karena mempertimbangkan beberapa hal. Begitu pula yang dilakukan oleh presiden Jokowi dalam menangani bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala dimana beliau mengeluarkan kebijakan untuk membatasi masuknya bantuan internasional. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis mengapa Jokowi membatasi bantuan internasional dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala dengan menggunakan teori *decision making process* oleh Richard Snyder dimana suatu negara dalam membuat sebuah keputusan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** Bencana alam, Bantuan Internasional, Palu, Sigi, dan Donggala, presiden Joko Widodo, proses pengambilan keputusan.

## ABSTRACT

*Indonesia has made global headlines in recent years with reports around the world of the loss of hundreds of thousands of people's lives and the devastating effects of its devastating natural disasters, one of which is the earthquake and tsunami that occurred on September 28, 2018 in Palu, Sigi, and Donggala. After a disaster occurs, sometimes the presence of international assistance as one of the supporting aspects that can support the success of disaster management is often a consideration for a country. There are several factors that can influence a country's government's decision to accept or reject international assistance in natural disaster management because they consider several things. Likewise, what was done by President Jokowi in dealing with the earthquake and tsunami that occurred in Palu, Sigi and Donggala where he issued a policy to limit the entry of international aid. This study intends to analyze why Jokowi limited international assistance in dealing with the earthquake and tsunami in Palu, Sigi and Donggala by using the decision making process theory by Richard Snyder where a country in making a decision is influenced by internal and external factors.*

**Keywords:** *Natural disasters, International Aid, Palu, Sigi, and Donggala, president Joko Widodo, decision-making process.*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di garis khatulistiwa dan berada pada pertemuan empat lempeng besar dunia membuat Indonesia memiliki kondisi geologi dan geomorfologi yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa tektonik, longsor, dan tsunami (Herningtyas & Suwandono, 2014). Berdasarkan laporan Disaster Risk Index pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-36 sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana (WorldRiskReport, 2018). Dan salah satu bencana alam yang melanda Indonesia pada tahun 2018 adalah Gempa bumi dan Tsunami yang terjadi pada bulan September di provinsi Sulawesi Tengah yaitu di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Mayuri Mei Lin and Rebecca Henschke 2018).

Menurut catatan survei BMKG pada 28 September 2018, Palu dan Donggala diguncang gempa berkekuatan 7,5 SR dengan pusat gempa pada kedalaman 10 km dan jaraknya 26 km dari utara laut Donggala. Dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana tersebut cukup besar.

Menurut catatan akhir tahun BNPB, pada tanggal 30 Januari 2019 jumlah korban dan kerusakan yang terjadi di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong diperbarui. Korban tewas sebanyak 2.685 orang, korban yang hilang sebanyak 701 orang, korban luka berat sebanyak 2.537 orang dan jumlah pengungsi sebanyak 172.999 orang yang tersebar di 400 titik pengungsi yang telah

disediakan (Harwanto 2019). Pasca bencana alam, dukungan dan bantuan kepada Indonesia datang dari berbagai pihak, baik dari negara, organisasi internasional maupun dari lembaga swasta seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau yang biasa dikenal dengan INGOs (*International Non-Governmental Organization*). INGOs sendiri adalah institusi mandiri yang didirikan oleh sukarelawan dari suatu negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang terkena dampak oleh bencana tanpa adanya tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya, mereka sebagian besar didanai oleh kontribusi swasta dan bekerja secara internasional dalam berbagai masalah kemanusiaan, pembangunan dan lingkungan global. Organisasi ini bersifat sukarela dan tidak mempunyai keterkaitan dengan pemerintah tetapi lebih mengarah kepada kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan dari INGOs atau LSM tersebut yaitu untuk bahu-membahu meminimalisir dampak bencana alam melalui kesiapsiagaan sebagai langkah mitigasi dalam mengatasi adanya musibah atau penderitaan yang dialami korban suatu bencana seperti mempersiapkan pelayanan dasar sosial, sebagai agen advokasi, sebagai lembaga penggerak masyarakat, melindungi lingkungan dan menyelenggarakan pembangunan masyarakat namun bukan berarti menggantikan fungsi dari lembaga bantuan pemerintah tetapi peran mereka hanya untuk bertindak sebagai fasilitator dan katalisator antara masyarakat yang terkena dampak dan aparat pemerintah (Pratama, 2015, hal. 1).

Oleh karena itu kehadiran bantuan internasional baik INGOs dan IGOs sebagai mitra dalam masyarakat di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam beberapa hal seperti pembangunan pasca bencana baik yang bersifat fisik

maupun non fisik sesuai dengan peran INGOs yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2008. Pada bencana di Pasigala, INGOs juga turut berkontribusi dalam respons tersebut melalui keterlibatannya baik dalam klaster nasional penanggulangan bencana, distribusi, maupun kegiatan.

Namun disisi lain meskipun gempa dan Tsunami tersebut menimbulkan dampak dan korban yang parah, Presiden Indonesia Joko Widodo tidak menyatakan bencana tersebut sebagai bencana nasional dan bahkan Presiden membatasi bantuan internasional yang ditujukan untuk membantu para korban. Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, melalui forum terbuka pada tanggal 30 September 2018, sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Luar Negeri Indonesia ia mengatakan bahwa bantuan internasional harus dipilih selektif dan fokus pada negara-negara yang sudah menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia dan INGOs (*International Non-Governmental Organization*) yang memang memiliki kapasitas untuk merespon cepat bencana tersebut (Asmara, 2018).

Setelah terjadi gempa bumi pada tahun yang sama yaitu pada bulan Agustus di Lombok, pemerintah dengan tegas menolak bantuan internasional dan mendesak LSM lokal untuk tidak mengundang lembaga bantuan internasional. Pemerintah mengatakan bahwa bantuan internasional untuk Sulawesi Tengah akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan kebutuhan di lapangan mengingat bencana tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional (Asmara, 2018). Padahal status bencana apakah itu lokal atau nasional,

merupakan salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi cara pemerintah merespon bencana.

Kebijakan ini relatif berbeda dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi bencana di Aceh dan Yogyakarta dimana SBY cenderung menerima masuknya berbagai aktor untuk ikut serta dalam proses penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia, sedangkan Jokowi cenderung membatasi masuknya bantuan internasional (Gunawan, 2014). Selain itu, pemerintah juga menahan bantuan asing yang sudah masuk ke Palu dan mencegahnya untuk diserahkan kepada para korban. Bantuan itu awalnya dikirim dari lembaga internasional atau LSM yang bekerja sama dengan LSM lokal di Palu, Sigi, dan Donggala. Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mengeluarkan keputusan tentang keterlibatan pekerja bantuan asing, yang menyatakan bahwa mereka harus melakukan semua kegiatan melalui mitra lokal, dan terdaftar di lembaga pemerintah. Oleh karena itu pemerintah Jokowi bekerjasama dengan menteri luar negeri Indonesia melalui juru bicaranya untuk menginfokan keputusan tersebut kepada para LSM internasional, sehingga Pada tanggal 7 Oktober 2018, Kantor Berita Nasional Antara atau disingkat LKBN melaporkan adanya pembatasan pada LSM internasional untuk tidak memberikan bantuan langsung kepada para korban di daerah yang terkena bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat bahwa akan sulit untuk mengelola sejumlah besar pekerja bantuan asing tanpa sistem pengawasan yang jelas, karena membiarkan orang asing memasuki wilayah bencana tanpa batasan dan manajemen yang jelas hanya akan membuat satgas negara bekerja lebih keras, mengingat keputusan

pembatasan ini juga sudah dikeluarkan oleh presiden Jokowi pada saat menanggapi bencana di Lombok sebelum terjadi bencana di Palu, Sigi, dan Donggala. Larangan ini kemudian berdampak negatif pada pengiriman bantuan yang akibatnya membuat kondisi korban semakin memburuk (Retnoningsih & Nugroho, 2021)

Hal tersebut kemudian menimbulkan tanda tanya besar, mengapa implementasi bantuan internasional harus melalui partner lokal dan bukan implementasi langsung oleh INGOs (*International Non-Governmental Organization*), padahal sudah jelas bahwa tujuan dari adanya bantuan internasional pada saat gempa dan tsunami merupakan salah satu cara yang efektif dimana keberadaan INGOs (*International Non-Governmental Organization*) di Indonesia tentunya diharapkan dapat berkontribusi dalam beberapa hal seperti pembangunan pasca bencana sebagai partner pemulihan masyarakat sesuai dengan peran INGOs (*International Non-Governmental Organization*) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2008 tentang peran lembaga internasional dan lembaga non pemerintah dalam menanggulangi bencana yaitu untuk, mengurangi ancaman dari bencana, berkontribusi dalam upaya penanggulangan bencana, mengurangi penderitaan korban bencana, dan memulihkan kehidupan masyarakat (BNPB 2008).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa Jokowi membatasi bantuan internasional dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala tahun 2018 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan mengapa Jokowi mengeluarkan kebijakan membatasi bantuan internasional dalam menangani bencana dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala tahun 2018.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi manfaat seperti dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi para penstudi hubungan internasional yang tertarik dalam membahas ilmu politik, khususnya bagaimana teori decision making yang membahas faktor-faktor dan juga aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara dan juga tertarik dengan bagaimana peran dan hambatan bantuan internasional dalam bencana alam dan nantinya dapat dapat dijadikan referensi dalam kepustakaan ilmu hubungan internasional terutama di Universitas Islam Indonesia.

### **1.4 Cakupan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah mengapa Jokowi membatasi masuknya bantuan internasional dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala maka peneliti membatasi cakupan penelitian ini pada rentang tahun 2014-2019. Mengambil 2014 sebagai awal penelitian karena di tahun 2014 merupakan tahun awal dimana presiden Joko Widodo memulai masa pemerintahannya, kemudian pada rentan tahun 2014-2018 telah terjadi beberapa bencana alam secara runtut yang melanda Indonesia yang mana perlu untuk melibatkan bantuan dari mitra internasional sehingga peneliti ingin menganalisis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Joko Widodo dalam

merespon bantuan internasional tersebut, mengingat keputusan membatasi bantuan internasional dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala berangkat dari analisis jauh sebelum peristiwa gempa dan tsunami melanda Palu, Sigi, dan Donggala. Bencana yang pernah terjadi di masa pemerintahan Jokowi yang melibatkan bantuan internasional salah satunya yaitu bencana gempa di Lombok pada tahun 2018, yang mana pada saat itu presiden Jokowi juga membatasi masuknya bantuan internasional yang ditujukan untuk membantu para korban yang terdampak, sehingga membuat kondisi korban semakin memburuk. Kemudian untuk batas akhir penelitian yaitu di awal tahun 2019 karena kebijakan mengenai pembatasan bantuan internasional sudah mulai dilonggarkan oleh presiden Jokowi mengingat kondisi dari adanya bencana yang melanda Palu, Sigi, dan Donggala termasuk dalam skala besar, sehingga diperlukan adanya bantuan internasional yang berkelanjutan dalam menangani bencana tersebut dan pada tahun tersebut Joko Widodo juga akan mengakhiri masa pemerintahannya pada periode pertama menjadi presiden.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah pernah dipublikasikan agar menjadi acuan dan pembeda agar tidak terjadi plagiasi dengan penelitian sebelumnya serta menjadi tolak ukur dan landasan penulis untuk meneliti topik yang diambil, diantaranya adalah:

Penelitian pertama adalah sebuah artikel dari jurnal Hubungan Internasional berjudul "*Efektivitas Bantuan Luar Negeri di Aceh selama 2004-2010 setelah Tsunami Samudra Hindia tahun 2004*" yang ditulis oleh Reza

Akbar Felayati. Penelitian ini ingin menjelaskan keefektifan bantuan luar negeri dalam tsunami Aceh dari tahun 2004 hingga 2007. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua hasil terkait keefektifan bantuan luar negeri dalam tsunami Aceh dari tahun 2004 sampai tahun 2007 mengenai persebaran bantuan yang tidak terarah sehingga tidak tepat sasaran dan kurangnya informasi serta penyalahgunaan dana seperti korupsi dalam proses pemberian bantuan kepada korban bencana (Felayati, 2016).

Penelitian kedua yaitu jurnal yang berjudul “*Collaborative Governance in the Management of Integrated Community Shelters Post Disaster (ICS) in the City of Palu*” yang ditulis oleh Muhammad Ahsan Samad dan Ismail Suardi Wekke. Penulis menjelaskan bagaimana keterlibatan organisasi kemanusiaan dalam proses rekonstruksi setelah bencana gempa dan tsunami melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Kehadiran organisasi kemanusiaan dapat memainkan peran penting dalam mendukung upaya rekonstruksi pascabencana alam, konflik, dan krisis kemanusiaan lainnya. Penulis juga menemukan bahwa adanya kelemahan negara dalam mengendalikan dan mewujudkan keikutsertaan lembaga kemanusiaan dalam proses rekonstruksi (Samad & Wekke, 2020)

Penelitian ketiga yaitu Jurnal yang berjudul “*Evaluating Indonesia's Disaster Diplomacy Practices Under The Jokowi Administration in 2018*” yang ditulis oleh Surwandono, Zain Maulana, Tri Astuti Susanthi Retnoningsih, Ariyanto Nugroho. Artikel ini mengkritik pelaksanaan diplomasi bencana Indonesia di tahun 2018. Di satu sisi, bantuan internasional diakui sebagai salah satu faktor kunci dalam membantu meminimalkan risiko bencana. Namun disisi lain justru bersifat kontroversial dimana dianggap sebagai variabel yang dapat

mengurangi legitimasi pemerintah Indonesia dalam menangani bencana. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintahan di era presiden Joko Widodo dalam merespon bencana cenderung fokus pada keamanan negara tanpa memperhatikan keamanan warga negaranya (Retnoningsih & Nugroho, 2021).

Penelitian keempat yaitu sebuah jurnal berjudul *“Tanggung Jawab Negara untuk Menerima Bantuan Kemanusiaan saat Tanggap Darurat Bencana Alam”* yang ditulis oleh Natalia Yeti Puspita dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa negara tidak perlu memikirkan keamanan negara ketika terjadi bencana alam yang darurat karena keamanan manusia jauh lebih penting dan hak-hak manusia sebagai korban bencana dapat terpenuhi. Menghadirkan bantuan kemanusiaan dari pihak eksternal ketika negara yang bersangkutan tidak sanggup lagi menanggulangnya adalah solusi yang dapat diambil oleh negara (Puspita, 2015).

Penelitian kelima yaitu sebuah jurnal yang ditulis oleh Amaranila Nariswari mahasiswi Hubungan internasional Universitas Airlangga yang berjudul *“Penolakan India terhadap Bantuan Luar Negeri dalam Perspektif Konstruktivisme: 2004 Indian Ocean Earthquake and Tsunami & 2008 Kerala Floods”*. Penelitian ini membahas mengenai alasan India menolak bantuan luar negeri pada saat terjadi Gempa Bumi dan Tsunami Samudra Hindia 2004 & Banjir Kerala 2008, dimana India ingin menjadi donor bagi negara lain yang lebih membutuhkan seperti Ghana, Senegal dan Zambia sebagai imbalan atas pembukaan pasar dan peluang investasi untuk India. Oleh karena itu, dengan kebijakan India menolak bantuan luar negeri dimaksudkan agar India dapat

memposisikan dirinya sebagai negara yang kuat dan mandiri dan bukan negara yang lemah (Amaranila Nariswari 2019).

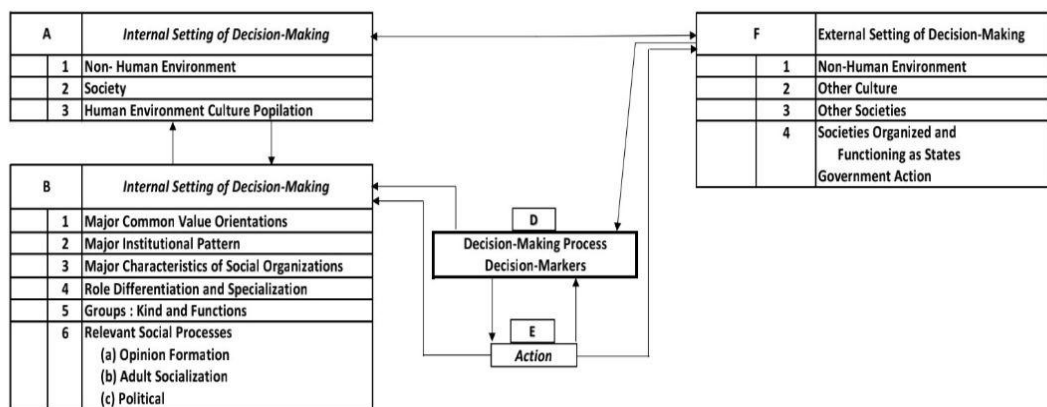
Berdasarkan kajian penelitian di atas beberapa penulis sudah ada yang menjelaskan alasan mengapa negara kerap kali membatasi masuknya bantuan internasional pada saat terjadi bencana alam namun tempat penelitian yang dilakukan berbeda, peneliti terdahulu membahas mengenai Evaluasi diplomasi bencana di era Jokowi pada tahun 2018 di seluruh daerah di Indonesia, sedangkan tempat penelitian yang ingin penulis teliti lebih fokus pada gempa dan tsunami yang terjadi di daerah Palu, Sigi, dan Donggala. Semua penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu alasan mengapa negara sering menolak atau membatasi bantuan internasional, namun yang membedakan adalah mengenai unit eksplanasinya, sehingga posisi penulis dalam hal ini adalah mengembangkan penelitian sebelumnya.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan teori *decision-making process* menurut Richard C. Snyder dimana Richard Snyder mengemukakan pendapatnya mengenai proses pengambilan keputusan dalam buku "*American Foreign Policy Formulation: Principles and Programmes*" yang terbit pada tahun 1954 dan dalam buku lain "*Decision-making as an Approach to the study of International Politics*" yang terbit pada tahun 1953. Snyder memulai analisisnya dengan gagasan sederhana bahwa semua tindakan politik dilakukan murni oleh manusia dan ketika kita ingin memahami dinamika politik kita harus bersiap untuk melihat dunia bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri tetapi dari sudut pandang orang yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan (Rosenau,

1969, 167). Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui dan memahami tindakan politik dengan benar seperti yang dimaksudkan oleh Snyder bahwa proses pembuatan keputusan (*decision making*) merupakan salah satu cara untuk memahami perilaku negara dalam hubungan internasional dan untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak dan apakah keterlibatan individu atau kelompok juga dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan.

Richard C. Snyder menyampaikan bahwa dalam proses pembuatan keputusan terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara yaitu faktor internal dan eksternal (Bruck et al. 2002, p.60)



Gambar 1. *Internal dan External setting Snyder*

Sumber : Snyder et al., 1969, p. 201. *Decision-making as an Approach to the study of International Politics*. New York : Palgrave Macmillan

Gambar di atas menunjukkan proses pengambilan keputusan luar negeri menurut Richard Snyder.

#### **A. Faktor internal Pengambilan Keputusan**

Faktor internal lebih menekankan pada hubungan negara dengan masyarakat tempat para pejabat membuat keputusan dimana hal tersebut mencakup kondisi dan ideologi negara, kebudayaan, pengaruh dari masyarakat, penduduk, pertahanan keamanan dan politik domestik negara. Faktor ini memiliki 3 unsur atau variabel yaitu "*Non-Human Environment, Society, and Human Environment, Culture, and Population*". Berikut penjelasan variabel-variabel dalam *Internal Setting of Decision Making process* (Pratama, M. A. 2017, p.14).

1. *Non-Human Environment* merupakan lingkungan non-manusia atau faktor lingkungan yang tidak terkait dengan manusia, seperti sumber daya, letak geografis, dan kondisi ekonomi negara.
2. *Society* mengacu pada karakter, sikap, dan perilaku kolektif orang-orang di suatu negara atau komunitas, di mana hubungan antara pemerintah dan rakyat bersifat dinamis dan interaktif. Sehingga partisipatif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kebijakan pemerintah itu sendiri.
3. *Human Environment, Culture, and Population* merujuk pada lingkungan manusia, kebudayaan, dan populasi suatu negara dimana ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan dalam suatu negara.

Keputusan yang diambil dapat tercermin dalam nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

### **B. Faktor *Eksternal Pengambilan Keputusan***

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan atau kebijakan politik luar negeri suatu negara. Faktor eksternal adalah yang berasal dari luar negeri atau dari keadaan di luar wilayah nasional seperti situasi politik internasional, aliansi internasional dan konflik internasional (Snyder et al., 1969, p. 202). Faktor eksternal ini terdiri dari 4 faktor atau variabel, yaitu: (Pratama, M. A. 2017)

1. *Non-Human Environment* atau Lingkungan non-manusia. Hal ini mengacu pada faktor-faktor lingkungan non-manusia yang dapat memengaruhi pengambil keputusan negara lain, termasuk lokasi geografis negara lain atau situasi ekonomi negara lain.
2. *Other Cultures* atau budaya negara lain juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan di suatu negara. Seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, masyarakat semakin terhubung dengan masyarakat di negara lain dan nilai-nilai budaya semakin mudah tersebar di antara negara-negara. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi budaya dan nilai-nilai masyarakat, penting bagi pembuat keputusan untuk memperhatikan sensitivitas budaya dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi lokal.
3. *Other Societies* (Asosiasi lainnya) adalah faktor-faktor berupa kelompok opini masyarakat. Faktor-faktor seperti kelompok opini

masyarakat di luar negeri atau opini publik internasional dapat menjadi pertimbangan pembuat kebijakan saat merumuskan kebijakan. Dalam era globalisasi yang semakin terkoneksi, opini publik internasional dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu negara, terutama dalam hal kebijakan luar negeri atau perdagangan internasional.

4. *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* merupakan tindakan suatu negara terhadap negara lain dimana penting bagi suatu negara untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam membangun hubungan baik dengan negara lain dan memperkuat posisi mereka di mata internasional.

Teori Snyder tidak menuntut bahwa semua unsur yang ada baik faktor internal maupun faktor eksternal harus dimasukkan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menganalisis perilaku suatu negara. Sebaliknya, Snyder menekankan bahwa faktor internal dan eksternal merupakan variabel utama yang mempengaruhi perilaku dan kebijakan suatu negara (Bruck et al. 2002). Dari dua faktor di atas, keputusan Jokowi dalam membatasi bantuan Internasional dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal sendiri terdiri dari variabel Non-Human Environment (Pertimbangan Kondisi Politik Domestik Indonesia) dimana bencana yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala terjadi di tengah ketidakpastian politik dan ketegangan sosial, dimana bencana datang pada saat yang sulit bagi pemerintah yang pada saat itu sedang mempromosikan

perubahan kebijakan dari penerima bantuan menjadi donor atau pemberi bantuan (Adrini 2015) dimana sebelum terjadi bencana Palu, Sigi, dan Donggala, Indonesia sudah mengambil langkah untuk menjadi donor atau pemberi bantuan ketimbang hanya mengandalkan bantuan luar negeri, hal ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk menjadi pemain global dan mengambil peran yang lebih menonjol di dalam sistem internasional. Kemudian dari variabel Human Environment (Kemampuan Indonesia dalam menangani Bencana), hal ini dilihat dari pengalaman Indonesia dalam menangani bencana-bencana yang pernah terjadi sebelumnya dan bagaimana Indonesia menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat terjadi bencana. Untuk variabel Society atau opini masyarakat sendiri tidak terdapat opini masyarakat Indonesia dalam merespon kebijakan pembatasan bantuan internasional dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Selanjutnya untuk faktor eksternal sendiri terdiri dari variabel *Non Human Environment* (Kondisi dari sifat pemberian bantuan dan tantangan untuk mengkoordinasikan bantuan ke wilayah yang terdampak) dimana pemerintah Indonesia cenderung mempertahankan kepentingan nasionalnya terutama yang berhubungan dengan penguatan pertahanan karena ada kecenderungan Indonesia tidak percaya terhadap siapa saja yang ingin membantu ketika terjadi bencana, dikhawatirkan ada maksud terselubung di dalam bantuan tersebut. Untuk variabel eksternal lainnya seperti *other culture, other societies, Societies Organized and Functioning as States and Government Action* atau kebudayaan negara lain, opini masyarakat internasional dan tindakan negara terhadap negara lain tidak mempengaruhi proses pembuatan keputusan oleh Joko Widodo terhadap pembatasan bantuan

internasional dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.

### **1.7 Argumen Sementara**

Kebijakan Jokowi membatasi bantuan internasional dalam menangani bencana dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala dipengaruhi oleh faktor internal dan external. Faktor internal dapat dilihat berdasarkan ideologi dimana Indonesia adalah negara demokrasi. Negara harus mementingkan nasib masyarakat nya dengan mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi di dalam menghargai hak-hak manusia dimana dengan pembatasan masuknya bantuan internasional terhadap bencana yang melanda Palu,Sigi, dan Donggala adalah salah satu bentuk kemampuan Indonesia dalam melindungi warga dari bencana. Sedangkan faktor eksternal nya adalah Indonesia cenderung mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Indonesia terutama yang berhubungan dengan penguatan pertahanan menjadi salah satu alasan external yang perlu dipertimbangkan karena ada kecenderungan untuk negara Indonesia tidak percaya terhadap siapa saja yang ingin membantu ketika terjadi bencana, dikhawatirkan ada maksud terselubung di dalam bantuan tersebut (Retnoningsih & Nugroho, 2021).

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan ide, persepsi, pendapat atau keyakinan dari orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka (Creswell John W, 2012).

### *1.8.2 Subjek dan objek Penelitian*

Subjek yang diambil oleh penulis akan terfokus pada pemerintahan Jokowi. Sedangkan objek penelitian ini tertuju pada kebijakan Jokowi membatasi bantuan internasional dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala tahun 2018.

### *1.8.3 Alat Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber pengumpulan data. Jadi, peneliti tidak melakukan penelitian secara langsung melainkan melakukan studi riset atau studi kepustakaan melalui beberapa literatur yang dapat dipercaya kebenarannya dan dapat mendukung serta menjelaskan topik pembahasan dalam judul penelitian yang diteliti oleh penulis.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Penulis melakukan analisis melalui beberapa langkah diantaranya pra riset, yang kedua yaitu tahap pengolahan data, dan yang terakhir yaitu menganalisis data dengan cara menggabungkan data-data yang diperoleh dan mengaitkannya

dengan teori yang relevan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Penulis melanjutkan untuk menulis bab-bab berikutnya dengan membagi pembahasan menjadi empat bab, dimana rincian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

**BAB 1** merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB 2** merupakan bab yang membahas mengenai kebijakan Indonesia dalam merespon bantuan internasional sebelum bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.

**BAB 3** berisikan analisis mengapa Jokowi membatasi bantuan internasional terhadap penanganan bencana tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala dengan menggunakan teori decision making process oleh Richard Snyder yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

**BAB 4** berisi kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran yang diperlukan untuk pembahasan yang dibahas.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MERESPONS BANTUAN INTERNASIONAL SEBELUM DAN PADA SAAT BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI PALU, SIGI, DAN DONGGALA TAHUN 2018**

Sebelum membahas mengenai alasan penyebab Jokowi mengeluarkan kebijakan dalam membatasi bantuan internasional pada bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala maka pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan Indonesia dalam merespon bantuan internasional sebelum dan setelah terjadi bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Bab ini terdiri dari 3 sub bab, yang pertama menjelaskan mengenai kebijakan Indonesia terhadap bencana alam di Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespon bantuan internasional, yang kedua membahas mengenai kebijakan Indonesia terhadap bencana Alam di Indonesia dalam merespon bantuan internasional sebelum tahun 2018 di era kepresidenan Joko Widodo dan yang ketiga membahas mengenai kebijakan Indonesia terhadap bencana Alam di Indonesia dalam merespon bantuan internasional pada saat terjadi bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala tahun 2018 di era kepresidenan Joko Widodo.

## **2.1 Kebijakan Indonesia terhadap bencana Alam di Indonesia di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Merespons Bantuan Internasional**

Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY, menetapkan prioritas utama dalam kepemimpinannya yaitu pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau biasa disebut KKN (Sri 2017). Selain itu prioritas utama program-program yang dicanangkan pada masa pemerintahan SBY antara lain pengurangan perubahan iklim dan lingkungan hidup, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta peningkatan produksi dan ketahanan pangan (Agus 2021). Tentu saja program pemerintah SBY yang dapat langsung ditagih oleh bangsa Indonesia adalah program kesiapsiagaan tanggap bencana alam.

Selama menjabat sebagai Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan memfasilitasi pemberian bantuan internasional. Pada tahun 2007, Presiden Yudhoyono menandatangani peraturan yang dikenal sebagai Peraturan Presiden tentang Penanganan Bencana Alam atau peraturan perundang-undangan khusus penanggulangan bencana yang didasarkan pada Undang-Undang Pemerintah No. 24 Tahun 2007 yang mengatur mengenai sistem nasional penanggulangan bencana di Indonesia, baik di tingkat pusat hingga kabupaten di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan tersebut memberikan garis besar dan peran yang jelas dari pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat desa, termasuk peran masyarakat, sektor swasta, dan mitra internasional dalam penanggulangan bencana. Selain itu dalam proses pelaksanaannya diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (BNPB 2008).

Peraturan tersebut menetapkan pedoman tanggap pemerintah terhadap bencana alam dan menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga dan tingkat pemerintahan. Peraturan tersebut juga mengakui pentingnya bantuan internasional dalam menanggapi bencana alam dan menyediakan kerangka kerja untuk memfasilitasi pemberian bantuan tersebut (BNPB 2008). Ditetapkan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan daftar kebutuhan dan prioritas kepada masyarakat internasional dan akan mengkoordinasikan distribusi bantuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada daerah dan masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain itu, Presiden SBY membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2008 untuk mengawasi upaya tanggap bencana negara. BNPB bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penanggulangan bencana alam dan memfasilitasi pemberian bantuan termasuk bantuan internasional. Secara keseluruhan, Presiden SBY menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama antar berbagai aktor dalam penanggulangan bencana alam, termasuk masyarakat internasional. Didirikannya BNPB tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan secara efektif dan efisien kepada mereka yang paling membutuhkan setelah terjadinya bencana alam. (BNPB 2012).

Kepala BNPB memiliki kewenangan atas partisipasi organisasi internasional dan LSM dalam pra bencana, tanggap darurat dan fase pasca bencana menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Partisipasi

Badan Internasional dan LSM Asing. Dalam situasi non-darurat, organisasi internasional dan LSM diharuskan menyiapkan proposal, MoU, dan rencana kerja, dan mereka harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional. Selama keadaan darurat, proposal, nota kesepahaman, dan rencana kerja tidak diperlukan. Daftar personel, logistik, dan peralatan dapat diserahkan sebelum, selama, atau segera setelah bantuan tiba di Indonesia. BNPB memberikan persetujuan berdasarkan kebutuhan. Organisasi internasional dan LSM dapat berpartisipasi secara individu atau bekerjasama dengan mitra kerja Indonesia. Mereka dilarang melakukan kegiatan berlatar belakang politik atau keamanan nasional (JDIH BPK RI 2008).

Ketika bencana alam melanda, pemerintahan SBY mengerahkan personel militer negara dan aktor-aktor yang berperan dalam tanggap darurat lainnya untuk segera memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Pemerintah juga membentuk sistem koordinasi dengan organisasi bantuan internasional dan pemerintah asing yang menawarkan bantuan. SBY mengakui bahwa bantuan luar negeri dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam menanggapi bencana alam, dan ia menyambut baik bantuan dari mitra internasional (Andika and Rosyidin 2017). Namun, SBY juga tetap mengutamakan kedaulatan dan martabat Indonesia dalam menerima bantuan asing. Beliau menjelaskan bahwa bantuan luar negeri harus diberikan dengan cara yang menghormati kedaulatan Indonesia dan bahwa institusi dan sumber daya negara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam prakteknya, hal ini berarti bahwa SBY berusaha untuk berkoordinasi dengan organisasi bantuan asing untuk memastikan bahwa upaya mereka selaras dengan prioritas dan kebutuhan Indonesia sendiri (Felayati, 2016).

Selama masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014, Indonesia mengalami beberapa bencana alam, termasuk beberapa bencana besar yang melibatkan peran dan bantuan dari luar negeri seperti Gempa bumi dan Tsunami Aceh tahun 2004, Gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, dan Letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta tahun 2010.

Menanggapi tsunami yang terjadi pada tahun 2004 di era kepemimpinan SBY dimana dampak yang ditimbulkan dari bencana alam yang dahsyat itu sangat merugikan maka masyarakat internasional bersama-sama menyumbangkan lebih dari 7 miliar dolar bantuan kepada Indonesia (Strangio 2014). Sampai saat itu, bantuan tersebut adalah bantuan keuangan yang paling dermawan yang pernah diterima oleh satu negara selama bencana alam. Selain itu berbagai macam bantuan datang dari organisasi internasional dan negara, adapun bantuan yang berasal dari organisasi internasional ialah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *World Food Programme* (WFP), *International Rescue Committee* (IRC), *International Federations of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC) dan bantuan negara-negara asing seperti, Amerika Serikat, Australia, Jerman, Switzerland, Singapura, China, dan negara lainnya (Strangio 2014).

Secara umum, banyak bantuan internasional yang diberikan baik untuk mitigasi bencana, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Indonesia mendapat simpati dan perhatian dunia sehingga negara-negara maupun organisasi internasional bergerak untuk memberikan bantuan dalam jumlah yang besar. Bentuk bantuan tersebut bermacam-macam yang secara garis besar terbagi

menjadi lima jenis yakni, barang, tenaga, peralatan, keahlian dan uang (Nathania Dwi Marietta 2021). Bantuan yang langsung dapat dinikmati oleh korban bencana adalah bantuan yang berbentuk barang, tenaga, peralatan dan keahlian.

Sebagai Presiden Indonesia pada saat gempa dan tsunami di Aceh pada Desember 2004 serta bencana alam lainnya yang mendapatkan respon dari masyarakat internasional termasuk bencana gempa Yogyakarta 2006 dan letusan gunung merapi 2010, Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan terima kasih atas bantuan internasional yang diberikan oleh berbagai negara dan organisasi untuk membantu masyarakat Indonesia yang terkena dampak akibat dari bencana besar yang menimbulkan banyak korban jiwa (Detiknews 2005). Khusus di provinsi Sulawesi Tengah di masa pemerintahan SBY bencana alam yang pernah terjadi seperti banjir dan gempa bumi tidak menimbulkan dampak yang terlalu parah seperti yang terjadi di provinsi lainnya. Tetapi presiden SBY tetap mempersiapkan upaya tanggap darurat untuk meminimalisir dampak dari bencana secara efektif ketika terjadi bencana secara tiba-tiba (Build Change 2018).

## **2.2 Kebijakan Indonesia Terhadap Bencana Alam di Indonesia Sebelum Terjadi Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala di Era Presiden Joko Widodo Dalam Merespons Bantuan Internasional**

Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-7 pada 20 Oktober 2014. Di awal masa jabatannya, kepemimpinan Jokowi ditandai dengan fokus yang kuat pada reformasi, transparansi, dan efisiensi (Syailendra 2021). Prioritas utama program dan inisiatif Jokowi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, melindungi lingkungan, dan menarik investasi ke Indonesia. Tidak hanya itu program Jokowi sebagai presiden Indonesia terkait erat juga dengan pengurangan ancaman bencana alam dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan manajemen bencana, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan akses asuransi bencana, dan mempromosikan mitigasi perubahan iklim. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana alam dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat di seluruh Indonesia (Jemima 2022).

Di awal masa kepresidenannya, Joko Widodo (Jokowi) memaparkan visi dan misi dalam penanggulangan bencana di Indonesia yang mengutamakan kesiapsiagaan, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat. Visi Jokowi dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah mewujudkan masyarakat tangguh yang mampu mengantisipasi dan merespons bencana alam secara efektif (Deytri 2014). Untuk mencapai visi tersebut, misi pemerintahannya berfokus pada beberapa bidang utama, termasuk penguatan pengurangan risiko bencana yang bertujuan untuk memprioritaskan langkah-langkah dan kebijakan pengurangan

risiko bencana, seperti perencanaan penggunaan lahan, kode bangunan, dan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak bencana (Hasrul 2019). Selain itu Jokowi juga meningkatkan kesiapsiagaan dengan memberikan pelatihan dan sumber daya kepada masyarakat dan lembaga termasuk sekolah dan rumah sakit untuk memastikan bahwa mereka mampu merespon secara efektif jika terjadi bencana. Dan yang terakhir Jokowi juga meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menanggapi bencana, termasuk dengan memperkuat mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah dan dengan mitra internasional (BNPB 2021).

Pada masa kepresidenan Jokowi dari tahun 2014 sampai pada tahun sebelum terjadi gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, beberapa bencana alam sering terjadi di Indonesia dimana bantuan internasional memainkan peran penting dalam mendukung upaya respons Indonesia dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak. Pemerintahan Jokowi bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (Permanent Mission of the Republic of Indonesia 2015). Diantara bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia pada masa kepemimpinan Jokowi sebelum terjadi bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala adalah banjir di Bandung 2016, letusan gunung Sinabung 2017, gempa Aceh 2016 dan gempa Lombok 2018 (Sugeng 2021).

Di antara beberapa bencana alam yang terjadi sebelum bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, bencana yang mendapatkan respon dari masyarakat internasional adalah bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2018, pulau Lombok di Indonesia dilanda serangkaian gempa bumi dahsyat yang

menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang signifikan. Gempa bumi pertama terjadi pada tanggal 29 Juli, diikuti oleh beberapa gempa lagi di minggu-minggu berikutnya, termasuk gempa berkekuatan 7,0 pada tanggal 5 Agustus (Ramadhan 2018). Gempa bumi menyebabkan kerusakan luas pada bangunan dan infrastruktur di pulau itu, terutama di bagian utara dan timur. Puluhan ribu orang mengungsi dari rumah mereka, dan ratusan tewas atau terluka (Yanuar 2018). Menanggapi bencana tersebut, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan petugas tanggap darurat dan militer untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak. Para LSM Internasional yang memiliki partner lokal di Indonesia juga turut serta untuk membantu upaya pemulihan (Humas Setkab 2018).

Di antara lembaga internasional yang ikut membantu yaitu Salvation Army yang berada di Indonesia yaitu memberikan bantuan medis dan lainnya kepada masyarakat yang terkena dampak gempa di Lombok, mereka mendistribusikan sedikit beras, mie, gula dan air kemasan kepada penduduk yang terkena dampak (Internet Geography 2018). Ada juga Oxfam yang berbasis di Inggris melalui partner lokal nya di Indonesia menyediakan air minum bersih dan terpal untuk 5.000 orang dan berencana untuk mengintensifkan pengiriman bantuan. Pada 14 Agustus 2018, Uni Eropa juga mengumumkan tambahan €500.000 untuk meningkatkan tanggap darurat guna memenuhi kebutuhan yang paling mendesak bagi mereka yang terkena dampak gempa bumi dahsyat yang melanda pulau Lombok di Indonesia pada akhir Juli dan awal Agustus. Alokasi tersebut merupakan tambahan dari €150.000 awal yang diberikan pada awal Agustus, sehingga menambah kontribusi UE menjadi €650.000 (Internet

Geography 2018). Diperkirakan bantuan tersebut secara langsung bermanfaat bagi 80.000 orang yang rentan di beberapa daerah yang paling parah terkena dampak di kabupaten Lombok timur laut dan barat. Bantuan tersebut juga digunakan untuk membantu IFRC dalam menyatukan kembali keluarga yang terpisah akibat gempa bumi. Bantuan juga ditawarkan oleh negara lain termasuk Australia (Internet Geography 2018).

Pemerintah Indonesia sudah sering menyambut dan menerima bantuan internasional dalam penanggulangan bencana alam. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah asing dan organisasi bantuan untuk mengkoordinasikan upaya bantuan, mendistribusikan bantuan, dan menyediakan perawatan medis dan perlengkapan bagi masyarakat yang terkena dampak (Humas Setkab 2018). Namun pada masa kepemimpinan Jokowi sebelum gempa dan tsunami melanda Palu, Sigi, dan Donggala pada tahun 2018 memang sudah terlihat adanya pembatasan bantuan internasional dimana para LSM internasional yang ingin ikut serta dalam membantu korban atau memberi bantuan harus memiliki partner lokal yang berada di Indonesia.

### **2.3 Bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala dan Pembatasan Bantuan Internasional oleh Presiden Jokowi**

Secara geografis pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao serta Kepulauan Sulu, Filipina. Dan secara astronomis Pulau yang berbentuk bagaikan huruf K ini terletak di  $2^{\circ}08'$  Lintang Utara (LU) dan  $170^{\circ} 17'$  Bujur Timur (BT) (Puspasari 2022). Pulau Ini adalah salah satu pulau teraman karena letaknya yang tidak berhubungan langsung dengan dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Selain itu Pulau Sulawesi juga terletak di pertemuan tiga lempeng Australia, Filipina, dan Indonesia (lempeng Indonesia merupakan bagian timur Eurasia) (Puspasari 2022).

Sulawesi terbagi menjadi enam provinsi dan memiliki beberapa pulau kecil. Hal ini menjadikannya salah satu pulau dengan garis pantai terpanjang di Indonesia. Namun, hal inilah yang menyebabkan Pulau Sulawesi rentan terhadap bencana laut, seperti gelombang tinggi dan tsunami yang dipicu oleh gempa bumi bawah laut (Achmad 2012). Salah satu bencana besar yang pernah terjadi di pulau Sulawesi yaitu gempa dan tsunami yang melanda Palu, Sigi, dan Donggala yang berada di pulau Sulawesi bagian tengah. Gempa dengan magnitudo 7,5 SR yang disusul tsunami melanda Pesisir Barat Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Seperti dilansir laporan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), gempa tidak hanya dirasakan di Palu tetapi juga di beberapa kabupaten dan kota sekitarnya, yaitu Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Poso, Tolitoli, Mamuju, Samarinda, Balikpapan, Gorontalo, dan Makassar (Build Change 2018).

Karakteristik gempa Palu sangat berbeda dengan beberapa gempa yang di daerah lain, termasuk yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG, melaporkan gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah secara mutlak disebabkan oleh pergeseran sesar Palu-Koro, sedangkan di Lombok dipicu oleh bertambahnya sesar Flores. Kondisi ini dapat menyebabkan kumpulan gempa susulan yang menghasilkan gempa yang lebih kuat dari sebelumnya. Dari informasi data seismik USGS selama tahun 1927 - 2012 tercatat lebih dari 100 kali gempa dengan magnitudo di atas 5,0. Hal ini memperkuat dugaan bahwa wilayah Sulawesi mengalami perubahan struktur bawah tanah akibat gempa bumi dan akan terus terjadi, mengingat lempeng benua Australia juga terus bergerak hingga saat ini (Rehuella and Hartantyo 2018).

Dalam beberapa catatan, gempa yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala pada pukul 17.02.44 WIB terletak pada 0,18 LS dan 119,85 BT berjarak 26 km dari Donggala bagian utara Sulawesi Tengah, dengan kedalaman 10 km diketahui bukan yang pertama, tapi yang pasti guncangan tersebut lah yang paling kuat (Build Change 2018). Bencana dapat sering terjadi dan dengan kekuatan yang tidak terduga dapat mengakibatkan hancurnya komunitas lokal yang kurang siap sehingga sangat bergantung pada bantuan asing setelah bencana (Caron, Kelly, and Telesetsky 2014). Setiap negara berdaulat memiliki caranya sendiri untuk mempersiapkan diri menanggapi bencana besar. Tetapi walaupun dipersiapkan dengan baik, mungkin saja suatu negara membutuhkan bantuan spesialis dari negara lain yang skala bencananya melebihi kemampuan internal negara tersebut (Infopunt Veiligheid, n.d.). Oleh karena itu banyak negara bersedia memberikan bantuan ini. Perjanjian internasional telah dibuat dan organisasi didirikan untuk

memungkinkan kolaborasi lintas batas di berbagai bidang, seperti memberikan dan menerima bantuan jika terjadi bencana.

Pasca seminggu gempa dan tsunami melanda Sulawesi Tengah, berbagai negara menunjukkan simpati dan perhatiannya terhadap daerah di Indonesia yang terkena dampak bencana. Berbagai negara dan organisasi internasional bergerak cepat memberikan bantuan dalam berbagai bentuk seperti bantuan keuangan, bantuan pangan, sanitasi, tempat tinggal, transportasi udara, bantuan medis, dan lain-lain (Amirullah 2018).

Terkait bantuan internasional, banyak negara yang bersedia membantu dan bermurah hati dalam menanggapi gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah. Pada tanggal 29 September 2018, sehari setelah gempa dan tsunami melanda Palu, Sigi dan Donggala, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Wiranto untuk mengevakuasi korban dan mengatasi apapun dampak bencana dan segera berkoordinasi dengan DENA dan Angkatan Darat (Jordan, 2018). Pada tanggal 1 Oktober 2018, Pemerintah Inggris mengumumkan untuk memberikan bantuan bagi para korban. Penny Mordaunt, Anggota Parlemen menyatakan bahwa London telah menerima panggilan untuk bantuan dan bersedia mengirimkan tim profesional. Selain itu, Inggris juga telah mengumpulkan dana dengan total 2 juta Pounds untuk memasok kebutuhan dasar kebutuhan korban (Utomo, 2018). Dilaporkan juga bahwa Perdana Menteri India telah melakukannya dengan langsung menghubungi Presiden Joko Widodo dan berjanji akan memberikan dana sebesar USD 1 juta untuk membantu memulihkan terutama infrastruktur rumah. Hubungan dengan tawaran besar-besaran bantuan

internasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan menentukan mekanisme dan prosedur resmi pengiriman bantuan internasional (Setiawan, 2018).

Ada 29 negara dan empat badan kemanusiaan yang menawarkan bantuan, namun hanya 17 negara yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia yang sudah ditetapkan. Negara-negara itu antara lain AS, Perancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan Cina (BBC 2018). Selain itu, beberapa negara juga mentransfer dana yang cukup besar kepada pemerintah dan lembaga internasional yang sudah lebih dulu berbasis di Indonesia. Korea Selatan menyumbang senilai US\$1 juta, Cina melalui Palang Merah Cina menyumbang sebesar US\$200 juta, dan AHA center mengirimkan Tim ERAT ke Palu. Adapun Uni Eropa telah menggelontorkan bantuan kemanusiaan darurat senilai 1,5 juta euro atau Rp25 miliar (BBC 2018). LSM internasional yang berbasis di Indonesia juga sangat aktif dalam memberikan bantuan, baik sebagai respons khusus terhadap bencana ini maupun melalui program pembangunan yang ada. Meskipun hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai bantuan internasional, dikarenakan organisasi atau LSM tersebut sudah berbasis di Indonesia, beberapa dari mereka mengimpor peralatan untuk tanggap darurat, termasuk Oxfam International yang mengimpor peralatan untuk tempat berlindung (OXFAM 2018).

Namun, Pada tanggal 7 Oktober 2018, Kantor Berita Nasional Antara atau disingkat LKBN melaporkan adanya pembatasan pada LSM internasional untuk

tidak memberikan bantuan langsung kepada para korban di daerah yang terkena bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat bahwa akan sulit untuk mengelola sejumlah besar pekerja bantuan asing tanpa sistem pengawasan yang jelas, karena membiarkan orang asing memasuki wilayah bencana tanpa batasan dan manajemen yang jelas hanya akan membuat satgas negara bekerja lebih keras, mengingat keputusan pembatasan ini juga sudah dikeluarkan oleh presiden Jokowi pada saat menanggapi bencana di Lombok sebelum terjadi bencana di Palu, Sigi, dan Donggala. Larangan ini kemudian berdampak negatif pada pengiriman bantuan yang akibatnya membuat kondisi korban semakin memburuk (Retnoningsih & Nugroho, 2021). Peraturan tersebut dijelaskan oleh juru bicara Menlu, Arrmanatha Nasir, untuk memastikan hal tersebut relawan harus melakukan tindakan koordinasi dengan instansi terkait di Indonesia yang bertanggung jawab untuk memimpin rehabilitasi. Beberapa sukarelawan asing disarankan untuk pergi ke Palu karena belum adanya izin resmi dan belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait lembaga yang memenuhi (Setiawan, 2018).

Kebijakan tentang bantuan asing dan tenaga bantuan asing, atau relawan, tidak dimaksudkan untuk mencegah masuknya bantuan atau relawan ke Sulawesi Tengah, tetapi untuk memastikan bahwa mereka terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim penanggulangan bencana nasional atau lembaga di Indonesia yang memimpin penyelamatan dan upaya pemulihan. Semua bantuan dari pemerintah asing dikoordinasikan melalui Kementerian Luar Negeri, sedangkan upaya bantuan oleh LSM internasional dikoordinasikan oleh Palang Merah Indonesia. Indonesia tidak ingin berakhir dalam situasi di mana terus menerima bantuan

tetapi sudah memiliki persediaan atau kapasitas yang memadai di lapangan, Indonesia hanya ingin menerima bantuan yang benar-benar kami butuhkan, atau kapasitas yang kurang di lapangan. Pembatasan ini juga berlaku untuk pekerja bantuan dan sukarelawan asing, yang harus mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang sebelum pergi ke Sulawesi Tengah. Peraturan tentang pekerja bantuan internasional bukanlah hal baru di Indonesia, pemerintah telah membatasi jumlah staf asing yang bekerja di LSM terakreditasi di negara ini. Pihak berwenang Indonesia mulai mencegah staf LSM asing untuk bekerja di daerah bencana setelah gempa Lombok pada bulan Agustus .

Selanjutnya, adapun peraturan bagi LSM Internasional oleh pemerintah Indonesia yang ingin memberikan Bantuan di Sulawesi Tengah dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala diantaranya yaitu (Betteridge 2018):

1. LSM Asing tidak boleh terjun langsung ke lapangan. Semua kegiatan harus dilakukan dalam kemitraan dengan mitra lokal.
2. Warga negara asing yang bekerja dengan LSM asing tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di lokasi yang terkena bencana
3. LSM asing yang sudah mendapatkan atau menyiapkan barang bantuan ke Indonesia perlu mendaftarkan bantuannya ke kementerian atau lembaga terkait dan diberi mandat untuk bekerja sama dengan mitra lokal dalam menyalurkan bantuan

4. Jika masing-masing LSM belum mendaftarkan bantuannya ke kementerian atau lembaga terkait, mereka diminta untuk mendaftar ke BNPB untuk disalurkan ke masyarakat terdampak di lapangan.
5. LSM asing yang ingin memberikan bantuan dapat dilakukan melalui Palang Merah Indonesia atau PMI dengan bimbingan kementerian atau lembaga atau mitra terkait
6. LSM asing yang telah mengerahkan tenaga asingnya disarankan untuk segera menarik kembali tenaganya
7. Pemantauan relawan asing diperlukan.
8. Penyerahan barang bantuan untuk sementara dikoordinasikan oleh BNPB melalui Balikpapan.

Bantuan luar negeri didefinisikan sebagai transfer sumber daya secara sukarela dari satu negara ke negara lain dengan tujuan memberikan bantuan atau dukungan (Will 2001). Sumber daya tersebut dapat berupa bantuan keuangan, bantuan teknis, bantuan kemanusiaan, atau jenis bantuan lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung negara penerima. Bantuan asing biasanya diberikan oleh pemerintah, organisasi internasional, atau organisasi swasta, dan dapat diberikan untuk berbagai tujuan seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, bantuan bencana, atau mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi (Will 2001). Meskipun demikian, beberapa donor memang dapat menggunakan bantuan asing sebagai alat untuk mencapai tujuan strategis atau politik. Misalnya, bantuan dapat digunakan untuk membangun aliansi atau untuk mendapatkan pengaruh di wilayah tertentu. Meskipun bantuan luar negeri diberikan secara sukarela, negara penerima tidak wajib menerimanya jika tidak sejalan dengan kebijakan atau

prioritasnya. Negara memiliki hak berdaulat untuk memutuskan apakah akan menerima bantuan asing atau tidak dan dalam kondisi apa bantuan itu akan diterima. Pada akhirnya, keputusan untuk menerima atau menolak bantuan asing ada di tangan negara penerima, dan donor harus menghormati kedaulatan dan otonomi negara penerima dalam membuat keputusan tersebut (Sindy 2022).

Begitupun yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespon bencana yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala. Terjadinya kedua bencana yaitu gempa dan tsunami tentu menimbulkan rasa simpati dan empati oleh dunia internasional, sehingga banyak tawaran bantuan luar negeri ke Indonesia bermunculan, seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Meskipun begitu, Indonesia tidak serta-merta menerima bantuan dari luar negeri dalam menanggapi bencana yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala, melainkan Indonesia cenderung membatasi bantuan yang diberikan dengan dalih bahwa Indonesia mampu menangani permasalahan yang ada secara domestik dan pemerintah mengatakan bahwa bantuan internasional untuk Sulawesi Tengah akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan kebutuhan di lapangan mengingat bencana tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional (Asmara, 2018).

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN JOKOWI MEMBATASI BANTUAN INTERNASIONAL DALAM MENANGANI BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI PALU, SIGI, DAN DONGGALA TAHUN 2018 DARI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap tindakan Indonesia khususnya presiden Jokowi terhadap kebijakan pembatasan bantuan internasional dalam menangani bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teori decision making process oleh Richard Snyder.

Dalam mengambil sebuah keputusan, terkadang para pemangku kepentingan terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek yang dominan yang harus dipertimbangkan oleh suatu negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab I pada bagian kerangka teori. Richard Snyder dan kawan-kawan telah membagi proses pengambilan keputusan luar negeri dimana faktor yang menjadi penyebab kebijakan luar negeri dibuat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama menganalisis faktor internal dan yang kedua menganalisis faktor eksternal dari teori Richard Snyder yang menyebabkan Jokowi membatasi bantuan internasional.

### **3.1 Faktor Internal yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab I tepatnya pada kerangka konseptual, penulis akan mencoba menganalisis serangkaian faktor internal atau keadaan domestik Indonesia apa saja yang mempengaruhi Jokowi untuk membatasi bantuan internasional pada penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Diantara faktor-faktor internal tersebut terdiri dari pertimbangan politik domestik Indonesia dan kemampuan pemerintah Indonesia dalam menangani bencana itu sendiri.

#### *3.1.1 Non- Human Environment (Pertimbangan Politik Domestik Indonesia) yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala*

Pertimbangan politik dalam negeri adalah salah satu faktor penyebab yang masuk akal dalam menjawab pertanyaan terkait keputusan Jokowi dalam membatasi bantuan internasional pada penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah. Gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala terjadi di tengah ketidakpastian politik dan ketegangan sosial (H33 2018). Terjadinya serangkaian bencana yang terjadi di tahun 2018 secara runtut menyoroti pentingnya tata kelola dan manajemen bencana yang efektif, serta perlunya persatuan dan kerja sama dalam menghadapi krisis. Sehingga bencana memberikan kesempatan bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk bersatu dan menunjukkan ketangguhan dan solidaritas dalam menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, para pembuat

keputusan memiliki alasan yang baik untuk menunjukkan kekuatan dalam negeri misalnya, dengan mengatasi bencana sebesar itu sendirian (Surwandono, dkk. 2021).

Mengenai dampak politik dalam negeri yang dirasakan, gempa dan tsunami datang pada saat yang sulit bagi pemerintah Indonesia, yang saat itu sedang mempromosikan perubahan kebijakan dari penerima bantuan menjadi donor atau pemberi bantuan (Adrini 2015). Sebelum gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala pada September 2018, Indonesia sudah mengambil langkah untuk menjadi donor atau pemberi bantuan ketimbang hanya mengandalkan bantuan luar negeri. Pergeseran kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Indonesia yang lebih luas untuk menjadi pemain global dan mengambil peran yang lebih menonjol dalam urusan internasional. Dengan kata lain pembatasan masuknya bantuan internasional pasca terjadinya bencana alam di Palu, Sigi, dan Donggala dikarenakan Indonesia memiliki citra yang menggambarkan kekuatannya dalam sistem internasional. Sehingga menerima bantuan dari pihak lain setelah terjadi bencana kerap kali dipandang melemahkan pemerintahan suatu negara karena negara tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi (Surwandono, dkk. 2021). Oleh karena itu keputusan pembatasan atau bahkan penolakan bantuan internasional yang dikeluarkan oleh Joko Widodo dalam merespon bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan kekuasaan Indonesia agar dapat mencari dukungan politik dari dalam negeri sehingga dukungan ini juga dipandang sebagai cara untuk melawan masuknya pengaruh campur tangan pihak lain.

Indonesia merupakan negara yang memiliki perhatian khusus terhadap status atau perannya. Pada dokumen *Background Study Penyusunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) III 2015-2019* Sub-Bidang Politik Luar Negeri, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia), disebutkan bahwa sasaran-sasaran prioritas dari konsep Nawa Cita yang diusung pemerintah difokuskan pada empat gagasan utama, yakni (i) mengedepankan identitas Indonesia sebagai poros maritim dunia guna mendorong kerjasama dengan negara lain dan meningkatkan konektivitas maritim Indonesia, (ii) meningkatkan peran Indonesia sebagai Pelaku Politik Luar Negeri yang berdaulat, mandiri, dan aktif guna mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan dan dunia, (iii) menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kompetitif dan inovatif yang berfokus pada peningkatan daya saing perekonomian Indonesia agar dapat mendorong inovasi dan memperbaiki iklim usaha, dan (iv) merumuskan dan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang damai dan demokratis yang berfokus pada penguatan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia (Humas Setkab 2023). Oleh karena itu dengan misi yang diemban oleh pemerintah Indonesia tersebut mengharuskan Indonesia harus muncul sebagai kekuatan besar dunia yang memiliki kontribusi dalam perdamaian dan stabilitas global yang tentunya tidak hanya di lingkup domestik saja.

Indonesia telah mampu menunjukkan kemampuannya untuk menjadi salah satu pilar ekonomi global, terbukti dengan pertumbuhan dan modernisasi ekonomi yang terus berlanjut di Indonesia. Perekonomian suatu negara merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menentukan kesejahteraan dan kemajuan penduduknya. Ekonomi yang kuat dan stabil memberi orang

kesempatan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, dan standar hidup yang lebih baik, sementara ekonomi yang lemah atau tidak stabil dapat menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan standar hidup yang lebih rendah. Inilah sebabnya mengapa pemerintah sering memprioritaskan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sebagai tujuan utama dalam kebijakan dan strategi mereka. Menurut data Bank Dunia, selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019), Indonesia's pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5,2% per tahun. Pada tahun 2014, tahun Jokowi menjadi presiden, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,0%. Pada tahun-tahun berikutnya, perekonomian terus tumbuh dengan rata-rata sekitar 5,2%, dengan tingkat pertumbuhan 4,8% pada tahun 2015, 5,0% pada tahun 2016, 5,1% pada tahun 2017, 5,2% pada tahun 2018, dan 5,0% pada tahun 2019 (Royke 2019).

Selalu ada ruang untuk perbaikan, dan pemerintah kemungkinan akan terus mengupayakan kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Pemerintah mengklaim tingkat pertumbuhan 5% merupakan tanda positif bagi perekonomian Indonesia di tengah ketidakseimbangan perekonomian global (Royke 2019). Pasalnya, dibandingkan dengan negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen, terutama pada tahun 2018, yang merupakan tertinggi ketiga setelah India dan China. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla mengatakan, meski terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dan beberapa negara sejak 2018, kondisi perekonomian Indonesia tetap masih di atas 5 persen (Royke 2019).

Jika dilihat dari sisi kepentingan *decision makers* Indonesia, Joko Widodo yang pada saat itu menjabat sebagai presiden sedang mengikuti pemilihan umum untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden untuk periode kedua yaitu tahun 2020-2024. Pada saat terjadi bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala masa jabatan presiden Jokowi diperhitungkan akan berakhir beberapa bulan kemudian. Pemilihan umum untuk presiden selanjutnya diadakan pada 11 April 2019. Hal ini dapat dijadikan sebagai dorongan untuk mencari dukungan nasional dan meyakinkan masyarakat di Indonesia bahwa Jokowi mampu menangani permasalahan penanggulangan bencana yang terjadi di Palu, Sigi dan Donggala dengan satu tangan secara mandiri tanpa dukungan dari departemen lain. sehingga keputusan pembatasan bantuan internasional tidak lain adalah salah satu alasan Jokowi dapat menarik simpati masyarakat domestik agar dapat terpilih kembali pada pemilihan umum di tahun 2019.

Adapun aksi nyata yang dilakukan oleh presiden Jokowi dalam menanggapi bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala yaitu dengan melakukan kunjungan secara langsung ke daerah-daerah yang terdampak bencana untuk menilai kemajuan upaya pemulihan pasca bencana dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak (CNN 2018). Beliau juga bertemu dengan pejabat lokal dan tokoh masyarakat untuk membahas tantangan yang sedang berlangsung dan cara untuk mengatasinya. Selain itu, kunjungan Jokowi juga dapat memiliki tujuan simbolis, menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membantu memulihkan dan membangun kembali wilayah tersebut pascabencana. Ini juga dapat berfungsi sebagai cara untuk

meningkatkan moral dan memberikan harapan bagi masyarakat yang terkena dampak tragedi tersebut.

Joko Widodo memberikan bantuan yang sangat berarti bagi para korban gempa dan tsunami di Palu, baik pasca bencana maupun dalam upaya pemulihan jangka panjang. Segera setelah bencana, Jokowi memerintahkan pengerahan ribuan personel militer, polisi, dan tanggap darurat lainnya ke daerah bencana. Pemerintah menyediakan makanan, air, dan pasokan medis bagi para penyintas dan mendirikan tempat penampungan serta rumah sakit untuk merawat yang terluka. Jokowi juga berjanji akan memberikan dana untuk rekonstruksi rumah, bangunan umum, dan infrastruktur di daerah terdampak. Pemerintah mengalokasikan lebih dari 10 triliun rupiah (sekitar \$700 juta USD) untuk upaya rekonstruksi (CNN 2019). Selain itu, Jokowi meluncurkan program "Bangun Palu Lebih Baik" untuk mengkoordinasikan upaya pembangunan kembali dan untuk memastikan bahwa infrastruktur baru lebih tahan terhadap bencana di masa depan (Arys 2018). Program ini bertujuan untuk membangun bangunan dan infrastruktur tahan gempa, termasuk jalan, jembatan, dan sekolah. Jokowi juga bertemu dengan para penyintas dan mendengarkan keprihatinan dan kebutuhan mereka, berjanji untuk mengatasi keprihatinan mereka dan membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka. Beliau menekankan pentingnya partisipasi dan solidaritas masyarakat dalam upaya pembangunan kembali, mendorong masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mendukung para penyintas dan membangun kembali daerah yang terkena dampak (Arys 2018).

### *3.1.2 Faktor Human Environment (Kemampuan Pemerintah dalam Menangani Bencana) yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala*

Suatu negara mengambil keputusan untuk membatasi atau bahkan menolak bantuan internasional yang diberikan setelah bencana alam karena negara percaya mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk pulih dari bencana tanpa bantuan dari pihak lain (Amaranila Nariswari 2019). Persepsi ini menjadikan alasan Indonesia tidak membutuhkan bantuan yang diberikan dari pihak lain. Hal ini juga terlihat dari pengalaman Indonesia menghadapi bencana alam yang pernah terjadi dan bagaimana Indonesia Menyikapi permasalahan yang muncul.

Indonesia adalah salah negara yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat Indonesia sebagai negara dengan gempa terbanyak di dunia dengan lebih dari 11.000 gempa terjadi setiap tahunnya (Ahmad 2022). Selain sebagai negara yang rawan gempa, Indonesia sering dilanda letusan gunung berapi, banjir, dan tsunami, semua karena letaknya yang berada di Ring of Fire (Widhia 2022). Hal ini menandakan Indonesia telah memiliki pengalaman terkait bencana gempa dan tsunami yang cukup banyak dalam beberapa dekade sepanjang tahun 1840 hingga 2018, sehingga pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai justifikasi bahwa Indonesia telah terbiasa dengan bencana gempa dan tsunami di beberapa wilayah di negaranya.

Pada tahun yang sama sebelum terjadi gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, Indonesia juga awalnya membatasi bantuan internasional pada saat terjadi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lembaga internasional

diperbolehkan masuk ke Indonesia untuk memberikan bantuan jika pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden mengumumkan meminta bantuan, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2010 tentang “Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah pada Saat Tanggap Darurat” (BNPB 2014). Namun, yang terjadi pada saat itu, Presiden Joko Widodo tidak menyampaikan secara resmi untuk meminta bantuan kepada pihak lain diluar bantuan dari lingkup domestik. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho juga mengatakan, untuk mengirimkan bantuan antar negara ada aturan khusus yang harus ditaati, mengingat pada saat itu logistik dari dalam negeri Indonesia untuk membantu para pengungsi di Lombok masih tercukupi (Pebriansyah 2018). Pemerintah pusat dapat menangani permasalahan yang terjadi secara mandiri dan akan menerima bantuan yang ditawarkan apabila Indonesia membutuhkan bantuan tersebut.

Pemerintah Indonesia mengklaim memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola beberapa bencana. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya panduan atau strategi tersendiri untuk menangani permasalahan yang ditimbulkan akibat bencana gempa dan tsunami. Pemerintah Indonesia mempunyai undang-undang dan pedoman yang dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan bencana. Beberapa undang-undang yang dibuat untuk digunakan dalam proses mitigasi bencana diantaranya yaitu Undang-Undang Pemerintah No. 24 Tahun 2007 yang mengatur “Sistem Nasional Penanggulangan Bencana telah dikembangkan di Indonesia”, di tingkat pusat hingga kabupaten di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Jogloabang 2019). Peraturan

tersebut memberikan garis besar dan peran yang jelas dari pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat desa, termasuk peran masyarakat, sektor swasta, dan mitra internasional dalam penanggulangan bencana. Selain itu dalam proses pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (BNPB 2008).

Adapun beberapa hal yang menunjukkan upaya dan kemampuan pemerintah dalam menangani bencana di Palu, Sigi, dan Donggala diantaranya yaitu:

- a. Tanggap Darurat: Pemerintah Indonesia segera merespon bencana dengan mendeklarasikan status tanggap darurat. Langkah ini memungkinkan mobilisasi cepat sumber daya dan bantuan darurat yang diperlukan (ADB 2018).
- b. Penanganan Medis: Pemerintah mendirikan rumah sakit lapangan dan pos kesehatan untuk memberikan perawatan medis bagi para korban. Bantuan medis seperti obat-obatan, dokter, dan tenaga medis dikerahkan untuk membantu korban yang terluka (Krisiandi 2018).
- c. Evakuasi dan Pencarian: Pemerintah Indonesia meluncurkan operasi penemuan dan pencarian yang melibatkan tim dari berbagai lembaga, termasuk TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tim-tim ini bekerja keras untuk menemukan dan menyelamatkan korban yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan (ADB 2018).
- d. Bantuan Logistik: Pemerintah mengirimkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, selimut, dan kebutuhan sehari-hari lainnya kepada

korban yang beraktivitas. Bantuan tersebut dikoordinasikan dengan baik untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan mendapatkan bantuan tepat waktu (Krisiandi 2018).

- e. Rekonstruksi dan Rehabilitasi: Setelah fase tanggap darurat, pemerintah fokus pada rekonstruksi dan pemulihan daerah yang diperbaiki. Hal ini melibatkan pemulihan infrastruktur, perumahan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan sumber daya lainnya (BP3D, BPBD, UNDP 2019).
- f. Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana: Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana di masa depan. Mereka meningkatkan infrastruktur peringatan dini, meningkatkan kapasitas petugas penanggulangan bencana, dan menyusun rencana penanggulangan bencana yang lebih baik (BP3D, BPBD, UNDP 2019).
- g. Perbaikan Sistem Koordinasi: Bencana di Sigi dan Donggala juga menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan sistem koordinasi agar tanggap terhadap bencana di masa depan menjadi lebih efektif (BP3D, BPBD, UNDP 2019).

Meskipun banyak tantangan dalam menghadapi bencana alam yang kompleks seperti gempa bumi dan tsunami, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemampuan dalam mengatasi bencana tersebut melalui tanggapan yang cepat, upaya penangkapan dan pencarian.

Di samping itu kebijakan yang dikeluarkan oleh para pembuat keputusan juga dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat nya. Keputusan penolakan penerimaan bantuan Internasional oleh Joko Widodo dipertimbangkan dengan mementingkan nasib masyarakat nya dengan mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi di dalam menghargai hak-hak manusia dimana dengan pembatasan masuknya bantuan internasional terhadap bencana yang melanda Palu,Sigi, dan Donggala adalah salah satu bentuk kemampuan Indonesia dalam melindungi warga dari bencana (Surwandono, dkk. 2021). Seorang pemimpin harus menjaga kepercayaan dari masyarakatnya dimana dengan masuknya bantuan atau relawan asing yang terlampau banyak merupakan gambaran dari ketidakmampuan pemerintah Jokowi dalam melindungi warganya dan ketidakmampuan Indonesia dalam menanggulangi bencana. Ditambah lagi dengan adanya peraturan mengenai jumlah keterlibatan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Indonesia memiliki konstitusi atau undang-undang pemerintahan mengenai pembatasan masuknya bantuan internasional yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Keterlibatan Organisasi Internasional dan Organisasi Non-Pemerintah Asing (LSM) tentang Mitigasi Bencana. Dalam keterlibatannya dalam penanganan masalah kebencanaan, aktor internasional memiliki 13% ruang untuk ikut serta dalam penanganan bencana, sisanya 87% adalah keterlibatan nasional. Dari 13% aktor internasional, sekitar 7% dari organisasi PBB, sedangkan sisanya berasal dari INGO (Organisasi Non-Pemerintah Internasional), IGO (Pemerintah Internasional Organisasi), dan masyarakat Internasional. (BNPBB 2008)

### **3.2 Faktor Eksternal yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala**

Selain faktor internal, dalam bukunya Richard Snyder juga memaparkan mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Teori Richard Snyder juga menyatakan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal memiliki posisi yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam perumusan sebuah kebijakan politik. Pada faktor eksternal, kebijakan Jokowi membatasi bantuan internasional pada penanggulangan bencana di Palu, Sigi, dan Donggala dipengaruhi oleh kondisi atau sifat pemberian bantuan internasional dan kondisi aksesibilitas serta tantangan dalam mengkoordinasikan bantuan ke wilayah yang terdampak bencana.

#### *3.2.1 Faktor Non- Human Environment ( Kondisi atau Sifat Pemberian Bantuan Internasional) yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala*

Sifat atau kondisi memberikan bantuan internasional menjadi salah satu alasan Jokowi awalnya membatasi bantuan internasional saat terjadi gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Jokowi prihatin dengan kondisi yang mungkin melekat pada bantuan internasional, terutama yang berkaitan dengan keberadaan pekerja bantuan asing dan personel militer. Ada ketakutan bahwa menerima bantuan asing dapat membahayakan kedaulatan nasional dan menyebabkan hilangnya kendali atas tanggap bencana (Surwandono, dkk. 2021).

Memang benar bahwa sifat bantuan internasional dapat menjadi faktor yang menentukan apakah suatu negara atau pemerintah memutuskan untuk menerima bantuan dalam menanggapi bencana atau tidak. Ada beberapa faktor terkait sifat bantuan internasional yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menerima atau menolak bantuan, antara lain (Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance 2021):

- Persyaratan yang melekat pada bantuan: Beberapa negara mungkin menempatkan persyaratan pada bantuan mereka yang tidak dapat diterima oleh pemerintah penerima. Misalnya, bantuan mungkin terkait dengan perubahan atau reformasi kebijakan tertentu yang tidak ingin diterapkan oleh pemerintah penerima.
- Kesesuaian dengan kebutuhan lokal: Bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal atau prioritas daerah yang terkena bencana tidak dapat diterima. Hal ini dapat terjadi ketika jenis bantuan atau keahlian yang ditawarkan tidak relevan dengan situasi spesifik di lapangan.
- Biaya dan kelayakan: Biaya dan kelayakan pengiriman bantuan juga dapat menjadi faktor dalam memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak. Dalam beberapa kasus, biaya pengiriman bantuan mungkin lebih tinggi dari nilai bantuan itu sendiri, atau logistik pengiriman bantuan mungkin terlalu menantang.
- Kedaulatan nasional: Beberapa pemerintah mungkin enggan menerima bantuan internasional karena mereka memandangnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional mereka. Mereka mungkin lebih suka

menangani sendiri upaya tanggap bencana atau memprioritaskan organisasi dan sumber daya domestik.

Pada saat gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, pemerintah Indonesia awalnya membatasi beberapa bentuk bantuan internasional. Sifat khusus dan jenis bantuan yang dibatasi termasuk:

- Tim SAR: Awalnya, pemerintah Indonesia menolak tawaran tim SAR internasional, lebih memilih mengandalkan kemampuan SAR domestik mereka sendiri. Beberapa negara dan organisasi yang memberikan bantuan SAR antara lain Australia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan PBB (CNN 2018).
- Bantuan medis: Pemerintah juga pada awalnya menolak bantuan medis internasional, karena mereka yakin memiliki cukup tenaga medis dan pasokan domestik untuk menangani situasi tersebut (BBC 2018).
- Bantuan keuangan: Ada laporan bahwa beberapa negara dan organisasi telah menawarkan bantuan keuangan untuk membantu upaya bantuan, tetapi pemerintah awalnya menolak tawaran ini. Beberapa pemerintah dan organisasi asing yang memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia yaitu Amerika Serikat, Australia, dan PBB (CNN 2018).
- Bantuan militer: Pemerintah sangat khawatir untuk menerima bantuan militer dari negara lain, karena mereka tidak ingin berkompromi dengan kedaulatan nasional atau terlihat terlalu bergantung pada kekuatan asing. Pembukaan akses bantuan asing, khususnya bantuan militer, akan bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dan UUD 1945 (BPHN 1992).

- Peralatan khusus: Ada juga tawaran peralatan khusus dan bantuan teknis, seperti drone dan peralatan berteknologi tinggi lainnya, tetapi pemerintah pada awalnya menolak tawaran ini, kemungkinan karena kekhawatiran tentang kompatibilitas teknis dan tantangan koordinasi (Adams 2018).

Niat Indonesia bukanlah untuk membatasi LSM internasional yang berpengalaman, yang banyak di antaranya memiliki kantor nasional yang substantif di Indonesia dengan staf yang didominasi oleh warga negara atau mengeluarkan pakar teknis yang relevan. Namun Indonesia mencoba melakukan semacam kontrol atas iring-iringan pihak asing yang mungkin tidak terlalu membantu dalam menangani bencana dimana diantara mereka beberapa memiliki minat khusus dan tidak berkoordinasi dengan pemerintah, dengan kata lain mereka bertindak atas dasar kepentingan pribadi (Betteridge 2018).

Pemerintah Jokowi dan BNPB memiliki alasan kuat untuk ingin melakukan pembatasan bantuan internasional, berdasarkan pengalaman masa lalu atau bencana yang pernah terjadi di Indonesia misalnya bencana yang melanda Aceh dimana dengan terlampaui banyaknya bantuan dan para pekerja asing yang masuk di Indonesia, membuat sulit bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengontrol hal tersebut, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pernah terjadi seperti perdagangan anak yatim piatu yang terpisah dari orang tuanya akibat bencana tersebut, yang mana pada saat itu, Birgithe Lund-Henriksen, kepala unit perlindungan anak UNICEF Indonesia, mengatakan UNICEF dan polisi Indonesia

telah mengkonfirmasi bahwa seorang anak laki-laki berusia empat tahun dibawa keluar dari Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh yang hancur, oleh pasangan yang mengaku sebagai anaknya (Reuters 2005). Lund-Henriksen juga mengatakan ada laporan lain tentang kemungkinan kasus perdagangan anak, termasuk seorang pekerja LSM melihat sekitar 100 bayi dibawa dengan speedboat di tengah malam di provinsi Aceh (Reuters 2005). Kejadian lain yang pernah terjadi yaitu masuknya bantuan yang tidak diinginkan, seperti obat kadaluarsa. Di antara obat-obatan yang diterima, sekitar 60% tidak termasuk dalam daftar obat esensial nasional Indonesia, 70% diberi label dalam bahasa asing dan 25% melewati atau mendekati tanggal kadaluarsa, atau tidak bertanggal. Sekitar 600 ton obat-obatan diperkirakan berada dalam kategori terakhir, kategori yang benar-benar tidak berguna, dengan perkiraan biaya pembuangan sebesar €2,4 juta (Davies 2016). Berdasarkan pengalaman buruk yang pernah terjadi pada saat bencana yang kemudian menyebabkan pemerintah Indonesia yaitu Presiden Jokowi dan BNPB ingin menghindari kejadian-kejadian tersebut agar tidak terulang lagi di Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, keputusan pemerintah Indonesia untuk membatasi beberapa bentuk bantuan internasional antara lain didorong oleh kekhawatiran tentang kedaulatan nasional dan kebutuhan untuk memprioritaskan koordinasi dan kontrol atas upaya tanggap bencana. Pemerintah juga mengutip kekhawatiran tentang sifat bantuan yang ditawarkan dan kebutuhan untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Namun, pemerintah akhirnya menerima bantuan internasional dan banyak LSM memainkan peran penting dalam mendukung upaya tanggap bencana.

*3.2.2 Faktor Non-Human Environment (Kondisi Aksesibilitas dan Tantangan Koordinasi) yang menyebabkan Jokowi Membatasi Bantuan Internasional Dalam Menangani Bencana Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala*

Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan awal Indonesia menolak bantuan internasional untuk penanggulangan bencana di Palu, Sigi, dan Donggala salah satunya adalah kondisi aksesibilitas dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan berbagai tantangan geografis dan infrastruktur. Daerah yang terkena dampak dari bencana gempa dan tsunami yaitu Palu, Sigi, dan Donggala terletak di pulau Sulawesi, terkenal dengan medan yang berat, infrastruktur transportasi yang terbatas, dan tantangan logistik (Ismail 2019).

Sebagai konsekuensi dari gempa bumi dan tsunami, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjangkau daerah yang terkena dampak, menaksir kerusakan, dan mengkoordinasikan respon. Beberapa jalan dan jembatan yang menuju ke daerah yang terkena dampak rusak atau hancur, dan bandara serta pelabuhan di daerah tersebut juga rusak, sehingga sulit untuk mengangkut perbekalan dan personel (Build Change 2018).

Selain itu, ada kekhawatiran tentang kepraktisan menerima bantuan internasional, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi dan logistik (Kovacs 2012). Ada kekhawatiran bahwa menerima bantuan dari berbagai sumber dapat menimbulkan tantangan koordinasi dan mungkin sulit mengatur aliran bantuan ke daerah yang terkena dampak. Mengingat tantangan-tantangan ini, pemerintah Indonesia mungkin awalnya percaya bahwa menerima bantuan internasional akan menciptakan tantangan logistik tambahan dan dapat memperumit tugas koordinasi

tanggap bencana yang sudah sulit. Namun, karena pemerintah dapat menilai situasi secara lebih lengkap dan meningkatkan kapasitas tanggapnya sendiri, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerima bantuan internasional dari beberapa negara dan organisasi. Keputusan ini didasarkan pada penilaian yang cermat atas kebutuhan khusus di lapangan dan kapasitas berbagai organisasi untuk memberikan bantuan secara terkoordinasi (Surwandono, dkk. 2021).

Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa seringkali terdapat tantangan birokrasi dan peraturan yang terkait dengan pengiriman bantuan internasional, termasuk masalah yang berkaitan dengan perizinan dari multi stakeholder (pemerintah pusat dan daerah serta dinas atau kementerian terkait) yang belum memahami terkait bagaimana mekanisme respon dari bantuan internasional (Kovacs 2012). Tantangan-tantangan ini terkadang dapat menunda atau menghambat pengiriman bantuan, dan mungkin memerlukan koordinasi dan komunikasi yang erat antara penyedia bantuan dan otoritas lokal. Selain itu sulit untuk organisasi internasional menemukan LSM lokal yang benar-benar memiliki kapasitas dan mampu untuk melakukan intervensi terhadap respon bencana (Surwandono, dkk. 2021).

Sulit bagi LSM untuk menemukan dan bekerja dengan organisasi lokal dalam upaya penanggulangan bencana di daerah seperti Palu, Sigi, dan Donggala karena berbagai alasan. Beberapa faktor yang mungkin menyulitkan antara lain (Muhammad 2018):

- Kapasitas lokal yang terbatas: Di banyak daerah yang terkena bencana, organisasi lokal mungkin tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk

menanggapi bencana secara efektif. Hal ini dapat mempersulit LSM untuk bermitra dengan mereka, karena mereka mungkin tidak memiliki keahlian atau sumber daya yang diperlukan untuk mendukung upaya LSM.

- Kurangnya komunikasi dan koordinasi: Selama upaya tanggap bencana, komunikasi dan koordinasi yang efektif antara LSM dan organisasi lokal sangat penting. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin terdapat kekurangan saluran komunikasi atau infrastruktur yang menyulitkan LSM untuk terhubung dengan organisasi lokal dan mengoordinasikan upaya mereka.
- Perbedaan budaya dan bahasa: LSM mungkin menghadapi hambatan budaya dan bahasa ketika bekerja dengan organisasi lokal, yang dapat menghambat kolaborasi dan komunikasi yang efektif.
- Masalah keamanan: Di beberapa daerah yang terkena bencana, masalah keamanan mungkin menyulitkan LSM untuk beroperasi dan bekerja dengan organisasi lokal. Hal ini terutama berlaku di daerah yang terkena dampak konflik atau ketidakstabilan politik.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan Jokowi untuk membatasi bantuan internasional pada awalnya didasarkan pada keadaan spesifik bencana di Palu, Sigi, dan Donggala. Dalam situasi bencana lainnya, pemerintah Indonesia telah menerima bantuan internasional dan bekerja sama dengan penyedia bantuan dan donor internasional untuk mengkoordinasikan upaya tanggap bencana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi dapat terjadi tanpa adanya peringatan, karena bencana alam tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi kapan saja dan dapat sangat mengganggu karena menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, rumah, serta hilangnya nyawa banyak orang. Sehingga terkadang menyulitkan negara-negara untuk bersiap dalam merespons bencana secara efektif. Setelah terjadi bencana alam, bantuan internasional sering datang untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat bencana. Bantuan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah asing, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kehadiran bantuan internasional sebagai salah satu aspek penunjang yang dapat mendukung keberhasilan penanggulangan bencana kerap kali menjadi pertimbangan suatu negara. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah suatu negara untuk menerima atau menolak bantuan internasional dalam penanggulangan bencana alam karena mempertimbangkan beberapa hal seperti kedaulatan nasional, pertimbangan politik, dan kapasitas upaya bantuan domestik. Keputusan Jokowi dalam merespon bencana yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala salah satunya. Keputusan Jokowi untuk membatasi bantuan internasional untuk gempa Palu, Sigi, dan Donggala menimbulkan pertanyaan penting dan menyoroti sifat kompleks dari upaya tanggap bencana.

Pada tahun 2018 silam terjadi bencana gempa dan tsunami yang melanda Palu, Sigi, dan Donggala. Bencana yang dahsyat ini menimbulkan banyak korban jiwa sehingga banyak pihak yang ingin ikut serta dalam membantu menanggulangi dampak dari bencana tersebut baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Jokowi justru mengeluarkan kebijakan yang membingungkan para relawan yang ingin ikut serta dalam menanggulangi bencana tersebut dimana Jokowi membatasi bantuan internasional pada bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.

Dalam studi kasus pada penelitian saya untuk menjawab alasan Jokowi membatasi bantuan internasional pada penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, penulis mencoba menganalisis menggunakan teori *decision making process* oleh Richard Snyder dimana faktor internal dan eksternal menjadi aspek yang saling berkaitan dalam merumuskan suatu kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan. Diantara faktor-faktor internal yang menyebabkan Jokowi membatasi bantuan internasional pada penanggulangan bencana gempa dan tsunami tersebut terdiri dari pertimbangan politik domestik Indonesia dan kemampuan pemerintah Indonesia dalam menangani bencana itu sendiri. Negara membatasi atau bahkan bisa menolak bantuan internasional yang ditawarkan setelah terjadi bencana alam karena negara merasa memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memulihkan kembali negaranya setelah terkena dampak bencana tanpa bantuan dari pihak lain. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan Jokowi membatasi bantuan internasional dipengaruhi oleh kondisi atau sifat pemberian bantuan internasional dan kondisi aksesibilitas serta tantangan dalam mengkoordinasikan bantuan ke wilayah yang terdampak

bencana. Sifat atau kondisi memberikan bantuan internasional menjadi salah satu alasan Jokowi awalnya menolak bantuan internasional saat terjadi gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Jokowi prihatin dengan kondisi yang mungkin melekat pada bantuan internasional, terutama yang berkaitan dengan keberadaan pekerja bantuan asing dan personel militer. Ada ketakutan bahwa menerima bantuan asing dapat membahayakan kedaulatan nasional dan menyebabkan hilangnya kendali atas tanggap bencana. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan Jokowi untuk menolak bantuan internasional pada awalnya didasarkan pada keadaan spesifik bencana di Palu, Sigi, dan Donggala. Dalam situasi bencana lainnya, pemerintah Indonesia telah menerima bantuan internasional dan bekerja sama dengan penyedia bantuan dan donor internasional untuk mengkoordinasikan upaya tanggap bencana.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan pemaparan penelitian yang telah dijelaskan diatas, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam menganalisis studi kasus yang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah permasalahan mengenai keterbatasan referensi mengingat masih belum banyak para peneliti yang meneliti terkait studi kasus yang dibahas oleh penulis. Oleh karena itu penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas isu mengenai pembatasan bantuan internasional oleh negara dalam merespon bencana alam untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan negara dalam membatasi bantuan internasional ketika terjadi bencana alam agar dapat menyempurnakan penelitian ini. Selain itu penulis juga menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk menganalisis teori *decision making process* oleh

Richard Snyder tidak hanya dari faktor internal dan eksternal saja tetapi memasukkan variabel-variabel lainnya yang sudah dijelaskan dalam bagan yang terdapat dalam buku Richard Snyder agar dapat menyempurnakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yasir B. 2012. "Kajian Potensi Tsunami Akibat Gempa Bumi Bawah Laut di Perairan Pulau Sulawesi." *Jurnal Teoretis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil* Vol. 19 No. 1 April 2012.
- Achmad Heru. 2019. "Peran AHA Centre Dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Sulawesi Tengah Tahun 2018." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* Volume 7, Nomor 4, 2019: 1517 – 1528.
- Adams, Richard. 2018. "Drones Assess the Aftermath of Indonesia's Destructive Earthquake." Medium.  
<https://medium.com/aerial-acuity/drones-assess-the-aftermath-of-a-indonesias-destructive-earthquake-1e60611d0abd>.
- Adrini, Pujayanti. 2015. "Kerjasama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia." *Politica* Vol. 6 No. 1.
- Agus, Danugroha. 2021. "Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penanganan Aceh Tsunami: Riset Sejarah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 6, No 1 April:1.
- Agus Wibowo, dkk. 2015. "Population Exposed to Natural Hazard." UNFPA Indonesia|. [https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population\\_Exposed\\_0.pdf](https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population_Exposed_0.pdf).
- Ahmad Sahroji. 2022. "Aktivitas Seismik di Zona Ring of Fire dan Alasan Mengapa Indonesia Rawan Gempa Bumi?" ERA.ID. <https://era.id/news/110335/aktivitas-seismik-di-zona-ring-of-fire-dan-alasan-mengapa-indonesia-rawan-gempa-bumi>.
- Akhmad Zamroni, dkk. 2020. "The assessment of landslides disaster mitigation in Java Island, Indonesia: a review." *Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology* Vol 5 No 3 2020.
- Amaranila Nariswari. 2019. "Penolakan India terhadap Bantuan Luar Negeri dalam Perspektif Konstruktivisme: 2004 Indian Ocean Earthquake and Tsunami & 2008 Kerala Floods." (Juni).
- Amirullah. 2018. "Pemerintah Batasi Jenis Bantuan Asing untuk Korban Gempa Palu." <https://nasional.tempo.co/read/1133671/pemerintah-batasi-jenis-bantuan-asing-untuk-korban-gempa-palu>.
- Andika, Muhammad T., and Mohamad Rosyidin. 2017. *Indonesia dalam pusaran global: politik luar negeri Susilo Bambang Yudhoyono*. N.p.: Pustaka Ilmu.
- Arys, Aditya. 2018. "Pasca-tsunami dan Gempa, Jokowi Bangun Palu Baru Rp 6 T."

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181015165517-4-37463/pasca-tsunami-dan-gempa-jokowi-bangun-palu-baru-rp-6-t>.

- Asmara, C. G. (2018, Oktober 06). *RI Selektif Terima Bantuan Asing Bagi Korban Palu, Kenapa?* News.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2010. *Pedoman Peran Serta Lembaga internasional dan Lumbago Non Asing Pemerintah Pada Saat Tanggap Darurat*.
- Bakry, U. S. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bambang Marwanta. 2005. "Tsunami di Indonesia dan Mitigasinya." *Alami* Vol. 10 Nomor 2.
- BBC. 2018. "Gempa dan tsunami Palu: Bantuan internasional berdatangan, tapi mengapa bantuan medis tak difasilitasi?" BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45717773>.
- BBC News. 2014. "Bagaimana tsunami terjadi pada 10 tahun lalu?" BBC. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/12/141223\\_tsunami\\_penjelasan](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141223_tsunami_penjelasan).
- BBC News Indonesia. 2018. "Tsunami sudah menerjang Indonesia sejak tahun 416." BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45742383>.
- BNPB. 2008. "Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional." BPBD KOTA SUKABUMI. <https://bpbd.sukabumikota.go.id/wp-content/uploads/2021/10/Peraturan-Pemerintah-No.-23-Tahun-2008.pdf>.
- BNPB. 2008. "PP 21 Tahun 2008." BNPB. [https://bnpb.go.id/ppid/file/PP\\_No.\\_21\\_Th\\_2008.pdf](https://bnpb.go.id/ppid/file/PP_No._21_Th_2008.pdf).
- BNPB. 2011. "Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana." Peraturan BPK. <https://bpbd.sukabumikota.go.id/wp-content/uploads/2021/10/Peraturan-Kepala-BNPB-No-20-Tahun-2011.pdf>.
- BNPB. 2012. "Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)."BNPB. <https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/477.pdf>.
- BNPB. 2013. "Terjadi Gempa 6,4 dan 6,2 Dalam Sehari." BNPB. <https://www.bnpb.go.id/berita/terjadi-gempa-6-4-dan-6-2-sr-dalam-sehari>.
- BNPB. 2014. "Peraturan Kepala BNPB No. 22 Tahun 2010." BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/peraturan-kepala-bnpb-no-22-tahun-2010>.
- BNPB. 2016. "Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana." BNPB. [https://eproposalrr.bnpb.go.id/manual/panduan\\_pedoman-penetapan-status-keadaan-darurat-bencana\\_1653618212.pdf](https://eproposalrr.bnpb.go.id/manual/panduan_pedoman-penetapan-status-keadaan-darurat-bencana_1653618212.pdf).
- BNPB. 2021. "Buka Rakornas PB 2021, Presiden Tegaskan Pencegahan dan Mitigasi Sebagai Kunci Utama Mengurangi Risiko Bencana." BNPB.

- <https://bnpb.go.id/berita/buka-rakornas-pb-2021-presiden-tegaskan-pencegahan-dan-mitigasi-sebagai-kunci-utama-mengurangi-risiko-bencana>.
- BPHN. 1992. “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.” BPHN. <https://www.bphn.go.id/data/documents/92uu009.pdf>.
- Bruck, H. W., Richard C. Snyder, Valerie Hudson, Burton Sapin, James M. Goldgeier, and Derek H. Chollet. 2002. *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*. Edited by Richard C. Snyder. N.p.: Palgrave Macmillan.
- Build Change. 2018. “Earthquake and Tsunami Reconnaissance Report.” Build Change. [https://buildchange.org/wp-content/uploads/2019/04/2019-02-04-Central-Sulawesi-Earthquake-and-Tsunami-Reconnaissance-Report\\_External\\_reduced.pdf](https://buildchange.org/wp-content/uploads/2019/04/2019-02-04-Central-Sulawesi-Earthquake-and-Tsunami-Reconnaissance-Report_External_reduced.pdf).
- Caron, David D., Michael J. Kelly, and Anastasia Telesetsky, eds. 2014. *The International Law of Disaster Relief*. N.p.: Cambridge University Press.
- Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance. 2021. “Indonesia INDONESIA Disaster Management Reference Handbook.” CFE-DM. <https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=BcQ7lZPdVD4%3d&portalid=0>.
- Cindy, Mutia A. 2023. “Indonesia Mendominasi Jumlah Penduduk di Asia Tenggara, Berapa Besarnya?” Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/indonesia-mendominasi-jumlah-penduduk-di-asia-tenggara-berapa-besarnya>.
- CNN. 2018. “BNPB Sortir Bantuan Asing dari 29 Negara untuk Gempa Palu.” CNNIndonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181003143423-20-335338/bnpb-sortir-bantuan-asing-dari-29-negara-untuk-gempa-palu>.
- CNN. 2018. “Kembali Datang ke Palu, Jokowi Minta Korban Gempa Tenang.” CNNIndonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181003102539-20-335251/kembali-datang-ke-palu-jokowi-minta-korban-gempa-tenang>.
- CNN. 2019. “Pemerintah Kucurkan Rp1,9 Triliun untuk Korban Gempa Palu.” CNNIndonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191008132329-20-437733/pemerintah-kucurkan-rp19-triliun-untuk-korban-gempa-palu>.
- Creswell John W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desvita Dianti Wiratami, dkk. 2021. “Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut.” *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)* Vol. 3 No. 2 (September): 92.

- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi tengah. (2019). *Masa Transisi Darurat Koordinasi Kegiatan dan Penangkapan Dampak kesehatan Bencana Gempa, Tsunami, Likuifaksi dan Tanah Bergerak Sulawesi Tengah*.
- Detiknews. 2005. "SBY Ucapkan Terima Kasih atas Donasi untuk Aceh." detikNews.  
<https://news.detik.com/berita/d-314612/sby-ucapkan-terima-kasih-atas-donasi-untuk-aceh->.
- Detik News. 2010. "AS Bantu US\$ 2 Juta untuk Penanganan Bencana Merapi dan Mentawai." detikNews.  
<https://news.detik.com/berita/d-1478982/-as-bantu-us-2-juta-untuk-penanganan-bencana-merapi-dan-mentawai->.
- DetikNews. 2021. "Tragedi Tsunami Aceh 17 Tahun Lalu: Gempa Dahsyat Diikuti Terjangan Tsunami." detikNews.  
<https://news.detik.com/berita/d-5870910/tragedi-tsunami-aceh-17-tahun-lalu-gempa-dahsyat-diikuti-terjangan-tsunami>.
- Deytri, Robekka A. 2014. "Ini Visi dan Misi Jokowi-JK." Kompas.com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/20/1421367/Ini.Visi.dan.Misi.Jokowi-JK>.
- Eko Adi Wibowo, and Evi Satispi. 2017. "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." Volume 15, Nomor 2 (Juli).
- Felayati, R. A. (2016). *Efektivitas bantuan Luar Negeri di Aceh selama 2004-2010 setelah Tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Jurnal Hubungan Internasional, Volume XI, 36.*
- Fidel, Ali P. 2014. "Ini Cerita SBY Ketika Menangani Bencana Tsunami Aceh." Kompas.com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2014/12/26/18293161/Ini.Cerita.SBY.Ketika.Menangani.Bencana.Tsunami.Aceh?page=all>.
- Gloria Setyvani Putri. 2021. "Mengenang Gempa Jogja 2006, Ini Mekanisme dan Potensi Bahayanya Halaman all." Kompas.com.  
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/27/120200623/mengenang-gempa-jogja-2006-ini-mekanisme-dan-potensi-bahayanya?page=all>.
- Gunawan, R. (2014, December 27). *Kisah SBY Hadapi Tsunami Aceh, Ancaman GAM dan Bantuan Asing*. Liputan6.com. Retrieved May 28, 2022, from <https://www.liputan6.com/news/read/2152838/kisah-sby-hadapi-tsunami-aceh-ancaman-gam-dan-bantuan-asing>
- H33. 2018. "Jokowi dan Politik Tsunami Palu." PinterPolitik.com.  
<https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-dan-politik-tsunami-palu/>.
- Harwanto, Bimo P. 2019. "Gempa dan Tsunami Sulteng Telan Biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rp 36 T" Merdeka.

<https://www.merdeka.com/uang/gempa-dan-tsunami-sulteng-telah-biaya-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-rp-36-t.html>.

- Hasrul, Hadi. 2019. "Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi." *Jurnal Geodika* Vol. 3, No. 1, Juni.
- Herningtyas, R., & Suwandono. (2014, Oktober). *Diplomasi Bencana Alam sebagai Sarana Meningkatkan Kerjasama Internasional*. Journal UMY. Retrieved May 28, 2022, from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/357/404>
- Humas Setkab. 2018. "Disarankan Tunda Kunjungan, Presiden Jokowi: Terbuka, Bantuan Asing Untuk Korban Gempa Lombok." Sekretariat Kabinet. <https://setkab.go.id/disarankan-tunda-kunjungan-presiden-jokowi-terbuka-bantuan-asing-untuk-korban-gempa-lombok/>.
- Humas Setkab. 2023. "Keketuaan ASEAN dan Visi Politik Luar Negeri Indonesia." Sekretariat Kabinet. <https://setkab.go.id/keketuaan-asean-dan-visi-politik-luar-negeri-indonesia/>.
- Ihsanuddin. 2018. "Presiden Jokowi: Yang Penting Penanganan Cepat, Bukan Status Bencana." Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/02/10461801/presiden-jokowi-yang-penting-penanganan-cepat-bukan-status-bencana>.
- Ika. 2017. "Jutaan Penduduk Indonesia Tinggal di Kawasan Rawan Bencana." Universitas Gadjah Mada. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13340-jutaan-penduduk-indonesia-tinggal-di-kawasan-rawan-bencana>.
- Indah Natasha Kindangen, dkk. 2021. "Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana." Vol. IX/No.13.
- Infopunt Veiligheid. n.d. "International disaster response." PreventionWeb. Accessed February 2, 2023. [https://www.preventionweb.net/files/ENG\\_KP\\_rampenbestrijding-nov-2013.pdf](https://www.preventionweb.net/files/ENG_KP_rampenbestrijding-nov-2013.pdf).
- Internet Geography. 2018. "Lombok Indonesia Earthquake 2018 Case Study." Internet Geography. <https://www.internetgeography.net/topics/lombok-indonesia-earthquake-2018-case-study/>.
- Ismail, Suardi W. 2019. "Earthquake, Tsunami, And Society Cooperation: Early Findings in Palu Post Of Indonesia Disaster."
- JDIH BPK RI. 2008. "PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana [JDIH BPK RI]." Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4835/pp-no-23-tahun-2008>.

- Jemima, Shalimar. 2022. "Jokowi: Pengurangan Risiko Bencana adalah Investasi Efektif." Kumparan.  
<https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-pengurangan-risiko-bencana-adalah-investasi-efektif-1y8juOlZiw1>.
- Jogloabang. 2019. "UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana." Jogloabang.  
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-24-2007-penanggulangan-bencana>.
- Kovacs, Gyongyi. 2012. *Relief Supply Chain Management for Disasters: Humanitarian Aid and Emergency Logistics*. Edited by Gyongyi Kovacs and Karen M. Spens. N.p.: Information Science Reference.
- Mahinda, Arkyasa. 2022. "The Devastation Caused by the 2004 Aceh Tsunami - News En.tempo.co." Tempo.co English.  
<https://en.tempo.co/read/1672457/the-devastation-caused-by-the-2004-aceh-tsunami>.
- Muhammad, Samad A. 2018. "Disaster Risk Management in Palu City."
- Nathania Dwi Marietta. 2021. "International Regime Approach in the Development of Indonesia's 2004 Post-Aceh Earthquake and Tsunami Disaster Regulations | Global Strategis." Journal Unair.  
<https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/18483>.
- OXFAM. 2018. "Respons Bencana Sulawesi Tengah | Oxfam di Indonesia." Oxfam di Indonesia.  
<https://indonesia.oxfam.org/apa-yang-kami-lakukan-hak-hak-dalam-krisis/respons-bencana-sulawesi-tengah>.
- Pebriansyah, Ariefana. 2018. "Indonesia Tolak Bantuan Luar Negeri untuk Korban Gempa Lombok." Suara.com.  
<https://www.suara.com/news/2018/08/08/163535/indonesia-tolak-bantuan-luar-negeri-untuk-korban-gempa-lombok>.
- Permanent Mission of the Republic of Indonesia. 2015. "Indonesia dorong pentingnya kerjasama internasional di bidang Penanganan bencana alam termasuk bencana berskala besar (Mega Disasters) Mission Indonesia in Geneva." Mission Indonesia in Geneva.  
<https://mission-indonesia.org/2015/03/15/indonesia-dorong-pentingnya-kerjasama-internasional-di-bidang-penanganan-bencana-alam-termasuk-bencana-berskala-besar-mega-disasters/>.
- Pratama, M. A. 2017. "Keputusan Amerika Serikat Mencabut Pembatasan Ekspor Minyak Mentah Tahun 2015." Jurnal Skripsi Digital Repository University Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/82740>.
- Prof. Dr. Mohtar Mas'oe'd, Weni Yasinta Huby. 2019. "Tantangan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Responce (AADMER) Sebagai Rezim Penanggulangan Bencana di Kawasan Asia Tenggara | HI Fisipol UGM." HI Fisipol UGM.

<https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/tantangan-asean-agreement-on-disaster-management-and-emergency-responce-aadmer-sebagai-rezim-penanngulangan-bencana-di-kawasan-asia-tenggara/>.

- Puspasari, Setyaningrum. 2022. "Kondisi Geografis Pulau Sulawesi Berdasarkan Peta: Letak, Luas, dan Kondisi Alam Halaman all - Kompas.com." Regional - KOMPAS.com.  
<https://regional.kompas.com/read/2022/08/06/154019978/kondisi-geografi-s-pulau-sulawesi-berdasarkan-peta-letak-luas-dan-kondisi?page=all>.
- Puspita, N. Y. (2015). *Tanggung Jawab Negara untuk Menerima Bantuan Kemanusiaan saat Tanggap darurat Bencana Alam*.
- Quantectum. 2022. "Seismic Activity in Indonesia." Quantectum Earthquake Forecasting Center.  
<https://quantectum.com/blog/seismic-activity-in-indonesia/>.
- Ramadhan, Kautsar. 2018. "Gempa Lombok 2018." Indonesia Re.  
<https://www.indonesiare.co.id/id/article/gempa-lombok-2018>.
- Rehuella, Palulun Z., and Eddy Hartantyo. 2018. "Analisis Percepatan Tanah Maksimum, Kecepatan Tanah Maksimum dan Simpangan Tanah Maksimum Kota Palu Menggunakan Worksheet Excel." *skripsi*.
- Ridhwan, Mustajab. 2023. "Kerugian Akibat Bencana Alam Mencapai Rp1,06 Triliun pada 2022." Data Indonesia.  
<https://dataindonesia.id/Ragam/detail/kerugian-akibat-bencana-alam-mencapai-rp106-triliun-pada-2022>.
- Royke, Sinaga. 2019. "Lima tahun Jokowi-JK, pencapaian dan tantangan tim ekonomi ke depan." ANTARA News.  
<https://www.antaranews.com/berita/1121210/lima-tahun-jokowi-jk-pencapaian-dan-tantangan-tim-ekonomi-ke-depan>.
- Rosenau, J. N. (1969). *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press.
- Ruslan, Burhani. 2009. "Amerika Bantu Korban Gempa Sumbar 10 Juta Dolar." ANTARA News.  
<https://www.antaranews.com/berita/156858/amerika-bantu-korban-gempa-sumbar-10-juta-dolar>.
- Samad, M. A., & Wekke, I. S. (2020). *Collaborative Governance in the Management of Integrated Community Shelters Post Disaster (ICS) in the City of Palu*.
- Silmi, Nurul U. 2022. "Apa yang Menyebabkan Indonesia Rawan terhadap Bencana Alam?" Kompas.com.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/25/152045469/apa-yang-menyebabkan-indonesia-rawan-terhadap-bencana-alam>.
- Sindy, Yulia P. 2022. "Independensi Negara terhadap Bantuan Luar Negeri sebagai Bentuk Bela Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume 9 Nomor (1),.

- Snyder. (2002). *Foreign Policy Decision-Making*. Jakarta: Gramedia.
- Sri, Cahyadi N. 2017. “*The Easerum Epicentre Pusat Studi Gempa bumi di Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.*” *Universitas Atmajaya*.
- Strangio, Sebastian. 2014. “Aceh Ten Years After the Tsunami – The Diplomat.” *The Diplomat*.  
<https://thediplomat.com/2014/12/aceh-ten-years-after-the-tsunami/>.
- Sugeng, Yulianto d. 2021. “Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional.” *Journal of Science Education* Vol 5, No. 2, 180-187.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surwandono, dkk. 2021. “Evaluating Indonesia’s Disaster Diplomacy Practices Under The Jokowi Administration in 2018.” *Journal of International Studies* Volume 5, No.2.
- Syailendra, Persada. 2021. “Jokowi: Rencana Kerja 2022 Fokus di Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.” *Nasional Tempo.co*.  
<https://nasional.tempo.co/read/1459143/jokowi-rencana-kerja-2022-fokus-di-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-struktural>.
- Syfa Zakiah. 2016. “Peran *Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (AHA Centre)* Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Filipina.” *Repository Unjani*.  
[http://repository.unjani.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=109&keyword=s](http://repository.unjani.ac.id/index.php?p=show_detail&id=109&keyword=s).
- Tiara Larasati. 2020. “14 Tahun Gempa Jogja: SBY dan Crisis Management Leadership yang Kuat.” *Kompasiana.com*.  
<https://www.kompasiana.com/tiaralarasati/5ece126e097f361f921575c3/14-tahun-gempa-jogja-sby-dan-crisis-management-leadership-yang-kuat>.
- UNESCO. 2011. “*Reducing and managing the risk of tsunamis.*” UNESCO Digital Library. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000214734>.
- UN News. 2006. “*International aid flowing to Indonesia following quake – UN.*” UN News. <https://news.un.org/en/story/2006/05/180742>.
- Widhia, Arum W. 2022. “Apa itu Ring of Fire? Penyebab Indonesia Rawan Dilanda Gempa.” *detikNews*.  
<https://news.detik.com/berita/d-6444291/apa-itu-ring-of-fire-penyebab-indonesia-rawan-dilanda-gempa>.
- Will, Kenton. 2001. “*What Is Foreign Aid? Forms of Aid, Statistics, and Examples.*” *Investopedia*.  
<https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-aid.asp>.
- WorldRiskReport. (2018). Retrieved May 28, 2022, from <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WorldRiskReport-2018.pdf>

- Yanuar, Nurcholis M. 2018. “Jumlah Korban Tewas Gempa Lombok Tercatat 105 Orang dan 236 Luka-luka.” *Tribun*.  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/07/jumlah-korban-tewas-gempa-lombok-tercatat-105-orang-dan-236-luka-luka>.
- Yosepha, Pusparisa. 2021. “2010-2020: Dekade Penuh Bencana Bagi Indonesia.” *Databoks*.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/19/2010-2020-dekade-penuh-bencana-bagi-indonesia>.
- Young, Ashley. 2019. “*The U.S. Response to the 2004 Tsunami in Indonesia – Association for Diplomatic Studies & Training.*” *ADST.org*.  
<https://adst.org/2019/10/the-u-s-response-to-the-2004-tsunami-in-indonesia/>.
- Zaki Amrullah. 2010. “Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Bencana Merapi – DW – 05.11.2010.” *DW*.  
<https://www.dw.com/id/pemerintah-pusat-ambil-alih-penanganan-bencana-merapi/a-6194457>.